

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JALAN KOL. H. BURLIAN KM 6,5
PALEMBANG



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

DINAS KEHUTANAN

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

Palembang, Januari 2024

KATA PENGANTAR



Laporan kinerja instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan LKjIP Tahun 2023 memuat rencana kegiatan, perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang terdiri dari kerangka pengukuran kinerja, target dan realisasi indikator kinerja, perhitungan indikator kinerja dan evaluasi capaian indikator kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palembang, Januari 2024

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

PANDJI TJAHHANTO, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Madya/ IV/d
NIP. 19671102 199403 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). LKjIP ini berisikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, merupakan rencana jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta 14 (empat belas) UPTD KPH terdapat 5 (lima) sasaran, 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan dengan dukungan dana dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.55.491.801.978,-. Dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 tersebut, terealisasi sebesar Rp. 53.124.970.011,- atau 95,73 % .

Lima sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya berhasil dicapai yang terdiri dari :

1. Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBP serta luasan konflik tenurial.

Pada sasaran pertama terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: a. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan dengan tingkat capaian 174,84% (b) Produksi kayu sub sektor kehutanan dengan tingkat capaian 186,72% (c) Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan dengan tingkat capaian 258,14% (d) Jumlah peta tematik yang KSP (tematik) dengan tingkat capaian 100%.

2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pada sasaran ke-2 (kedua) terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: (a) Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot) dengan tingkat capaian -969%.

(b) Penurunan luas kebakaran hutan (Ha) dengan tingkat capaian -25%. (c) Jumlah kasus yang tertangani (kasus) dengan tingkat capaian 233%. (d) Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio) dengan tingkat capaian 105,68%.

3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan.

Pada sasaran ke-3 (ketiga) terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: a. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi dengan tingkat capaian 158,82% dan b. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) dengan tingkat capaian 29,41%.

4. Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan.

Pada sasaran ke 4 (keempat) terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, yaitu: Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%), Indikator sasaran dicapai dengan tingkat capaian 83,33%.

5. Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik.

Pada sasaran ke-5 (kelima) terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, yaitu: Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%), indikator sasaran dicapai dengan tingkat capaian 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	11
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika.....	12
F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi.....	13
A. BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Rencana Kinerja	3
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023.....	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	20
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra.....	22
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	24
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	24
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
D. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	47
E. Data Dukung Pencapaian Kinerja	62
F. Inovasi	126

G. Penghargaan.....	128
BAB IV PENUTUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan	3
Tabel 2	Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	6
Tabel 3	Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	7
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	10
Tabel 5	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Rekomendasi	13
Tabel 6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	1
Tabel 7	Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2023	3
Tabel 8	Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	7
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	16
Tabel 10.	Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	20
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	21
Tabel 12	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	23
Tabel 13	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	25
Tabel 14	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023	32
Tabel 15	Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023	37

Tabel 16	Perbandingan Capaian Program/Kegiatan/sub Kegiatan terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.....	39
Tabel 17	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	48
Tabel 18.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1	63
Tabel 19.	Luas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hutan di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023	66
Tabel 20.	Produksi Hasil Hutan Kayu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	68
Tabel 21.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	69
Tabel 22.	Penerimaan Negara Sub Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	74
Tabel 23.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2	78
Tabel 24.	Penurunan Jumlah Hotspot Tahun 2022 -2023	81
Tabel 25.	Penurunan Luas Kawasan Hutan yang terbakar tahun 2022 dan 2023	86
Tabel 26.	Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Kehutanan Tahun 2023	90
Tabel 27.	Luas Hutan yang Berfungsi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati.....	96
Tabel 28.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3	98
Tabel 29.	Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	100
Tabel 30.	Rehabilitasi di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	101
Tabel 31.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4	106
Tabel 32	Alat ekonomi produktif untuk KTH.....	109

Tabel 33	Persetujuan Perhutanan Sosial yang ditetapkan Menteri LHK sampai dengan Tahun 2023	112
Tabel 34	Sebaran Penyuluh Kehutanan Tahun 2023	113
Tabel 35	Pendampingan Kelompok Masyarakat/ Kelompok Tani Hutan Tahun 2023	116
Tabel 36.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.	117
Tabel 37	Daftar Inovasi Dinas Kehutanan Tahun 2023.....	127
Tabel 38	Penghargaan Dinas Kehutanan Tahun 2023	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	5
Gambar 3.	Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	8
Gambar 4.	Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	5
Gambar 5.	Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	6
Gambar 6.	Identifikasi permasalahan lahan dalam kawasan hutan pada PT Musi Banyuasin Indah.....	66
Gambar 7	Pembinaan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten OKU Timur, Muba dan OKI.....	71
Gambar 8.	Pembinaan dan Monitoring pada PT PLN di Kabupaten OKUT dan PT GWN di Kabupaten Muba	72
Gambar 9	Kegiatan Rekonsiliasi administrasi pembayaran PSDH,.....	75
Gambar 10.	Monitoring dan Evaluasi penatausahaan hasil hutan pada CV Tanah Mas dan PT SBA Wood Industries.....	76
Gambar 11	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di HP Pedamaran Kabupaten OKU dan Kegiatan Evaluasi pengendalian kebakaran hutan di UPTD KPH Wilayah X Dempo	84
Gambar 12(a)	Sebaran hotspot tahun 2014 sampai 2023, dan (b) luas areal terbakar di Sumatera Selatan tahun 2015-2023.....	85
Gambar 13.	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan	86
Gambar 14	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	89

Gambar 15.	Sosialisasi dan Penegakan Pengamanan Hutan	92
Gambar 16.	Latihan menembak bagi Polisi Kehutanan dan Pejabat yang memiliki tupoksi perlindungan hutan	94
Gambar 17.	Sosialisasi dan koordinasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati.	96
Gambar 18.	Rehabilitasi Hutan pada Lahan Kritis di Kabupaten OKI	101
Gambar 19.	Monitoring Pengada Pongedar Tanaman Hutan Terdaftar	103
Gambar 20	Pembinaan dan pemantauan DAS pada wilayah UPTD KPH	103
Gambar 21	Pelaksanaan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan	108
Gambar 22.	Penyerahan Alat Ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan	109
Gambar 23.	Temu Lapang Rekayasa Tanaman Penghasil Gaharu	110
Gambar 24.	Seremonial Pembagian Akses Legal Perhutanan Sosial secara Virtual	110
Gambar 25	Fasilitasi kemitraan kerjasama KPS dan penanganan konflik	114

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan system pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat ikhtisar kinerja instansi yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Tujuan pelaporan kinerja diantaranya (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 didasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian outcome pada 5 Program dan capaian output pada 36 sub kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun 2023. Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

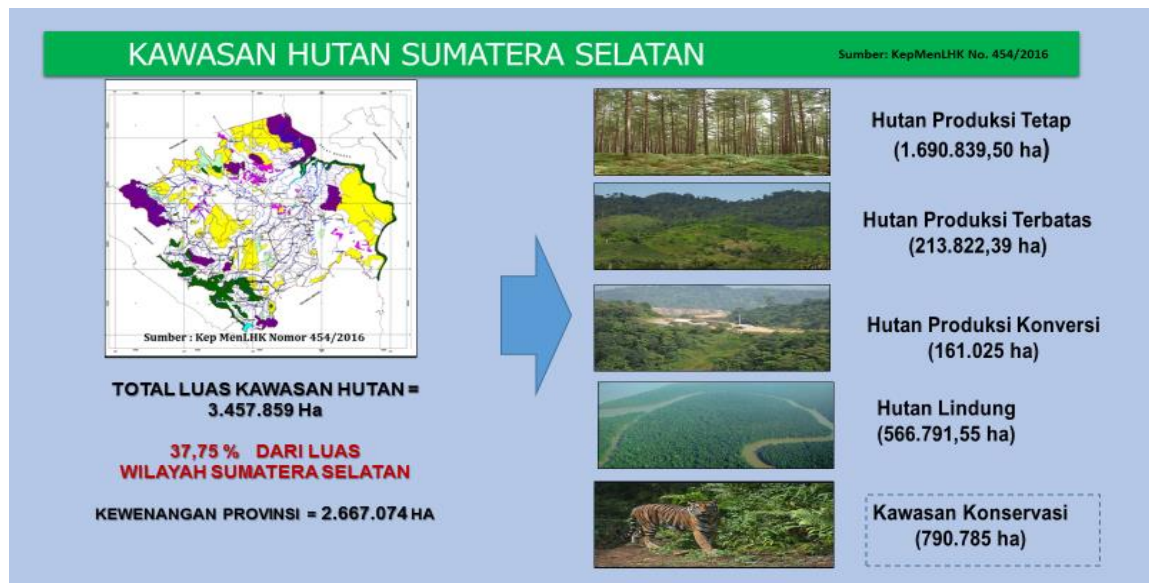
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan aktivitas organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi menetapkan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan.

Kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan seluas 39,50% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.457.859 ha terdiri dari Hutan Konservasi seluas 788.432 ha, Hutan Lindung seluas 577.651 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 213.018 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 1.696.133 ha dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 148.085 ha. Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi, sedangkan Hutan Konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.



Gambar 1. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1. Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten / Kota	Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha)											
		Taman Nasional			TWA	Tahura	CA	SM	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah
		Daratan	Perairan	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kab. Banyuasin	216,293	48,786	265,079	-	-	-	79,354	49,164		70,758	27,248	491,603
2	Kab. Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	3,759	66,388	4,555	3,233		77,935
3	Kab. Lahat	-	-	-	173	-	-	52,088	48,245	4,351	27,161		132,017
4	Kab. Muara Enim	-	-	-	-	-	-	8,863	61,598	25,498	156,240	13,105	265,305
5	Kab. Musi Banyuasin	2,308	205	2,513	-	-	-	65,036	16,301	94,301	398,494	59,987	636,632
6	Kab. Musi Rawas	74,378	-	74,378	-	-	-	-	969	7,386	167,045	19,795	269,573
7	Kab. Musi Rawas Utara	170,598	-	170,598	-	-	-	-	189	36,512	109,927	1,137	318,362
8	Kab. Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
9	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	15,387	96,963	10,035	642,534	24,070	788,988
10	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	68,309	18,647	54,959	-	141,915
11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	44,996	125,925	10,239	17,845	-	199,004
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	-	-	5	-	19,476	-	19,481
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,168	-	23,168
14	Kota Lubuklinggau	4,130	-	4,130	-	-	-	-	1,129	1,096	-	-	6,355
15	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	25,894	-	-	-	25,894
16	Kota Palembang	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
17	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	1,069	-	-	1,069
Jumlah Tahun 2020*		467,706	48,992	516,697	223	-	-	269,483	561,079	213,688	1,690,839	145,357	3,397,367

Sumberdata : Statistik Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Untuk pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

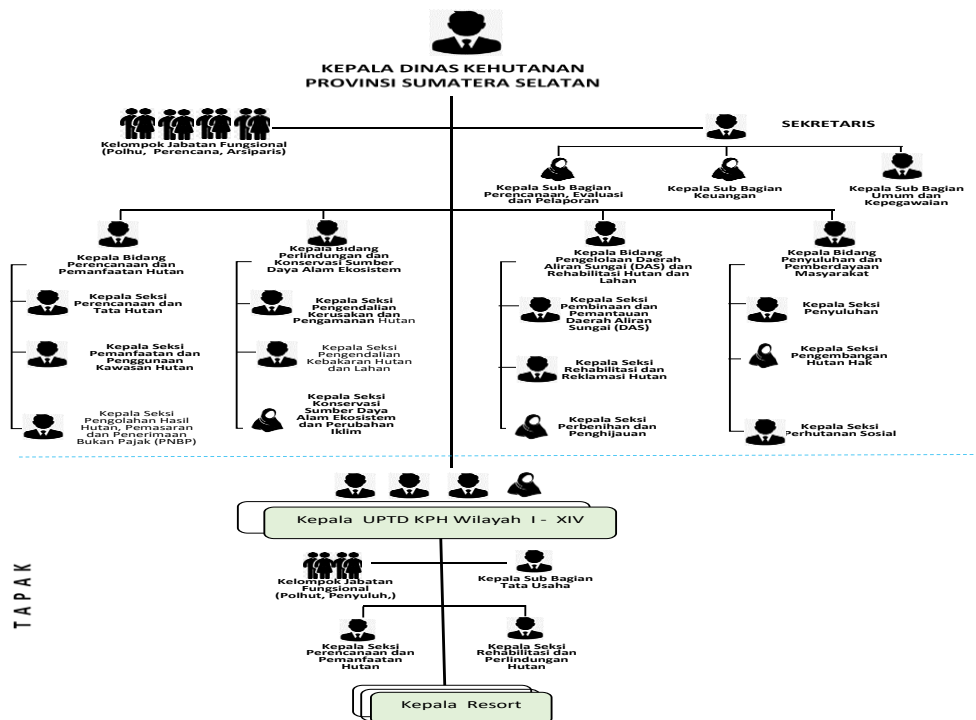
Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan. Tugas UPTD yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan serta melaksanakan fasilitasi pengembangan unit-unit KPHP dan/atau KPHL dalam wilayah kerjanya. Dinas Kehutanan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH berkedudukan di 16 kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- a. UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu
- b. UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis berkedudukan di Bayung Lencir
- c. UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin berkedudukan di Palembang
- d. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding berkedudukan di Kayu Agung
- e. UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji berkedudukan di kayu Agung
- f. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura berkedudukan di Batu Raja

- g. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka berkedudukan di Muara Dua
- h. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim
- i. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih
- j. UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam
- k. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berkedudukan di Lahat
- l. UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi
- m. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong di Lubuk Linggau
- n. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas di Muara Rupit.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, serta mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, terdiri dari: (1) Polisi Kehutanan (2) Penyuluh Kehutanan (3) Fungsional Perencana, dan (4) Fungsional Arsiparis.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

Dukungan SDM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera per bulan Juli tahun 2023 berjumlah 412 orang terdiri dari 296 orang PNS dan 116 orang tenaga Non PNS. Sebaran dan kompetensi SDM sebagai berikut :

Tabel 2 Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS	STATUS/KOMPETENSI (ORANG)							JUMLAH
		PNS				NON PNS			
		STRUKTURAL / NON	FUNGSIONAL POLHUT	FUNGSIONAL PENYULUH	FUNGSIONAL PERENCANA	PTT Pamhut Dalkar	PEGAWAI PPTPK	TKS	
1	Dinas Kehutanan	75	12	2	4	3	0	28	124
2	UPTD KPH Wilayah I Meranti	5	2	2	0	1	1		11
3	UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis	6	0	2	0	10	0		18
4	UPTD KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	17	0	3	0	3	2		25
5	UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur-Riding	8	1	2	0	4	1		16
6	UPTD KPH Wilayah V Lempuing-Mesuji	9	1	3	0	8	1		22
7	UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura	21	0	8	0	1	2		32
8	UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka	15	0	3	0	1	2		21
9	UPTD KPH Wilayah VIII Semendo	9	0	2	0	4	2		17
10	UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji	7	0	4	0	5	0		16
11	UPTD KPH Wilayah X Dempo	17	0	1	0	4	1		23
12	UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah	7	2	4	0	1	1		15
13	UPTD KPH Wilayah XII Benakat	6	1	2	0	9	1		19
14	UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong	15	1	6	0	10	1		33
15	UPTD KPH Wilayah XIV Rawas	10	1	0	0	8	1		20
	Jumlah	227	21	44	4	72	16	28	412
	Total PNS dan Non PNS	296				116			412

Sumberdata : Sekretariat Juli 2023

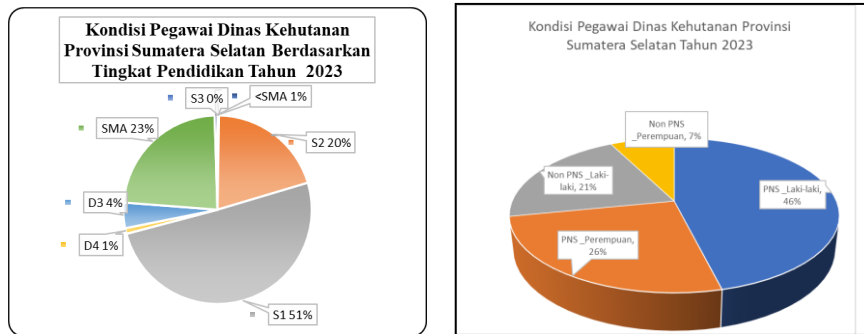
Secara terinci profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan baik yang ditempatkan di Kantor Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	JABATAN /STATUS	JUMLAH (Org)	PENDIDIKAN (Org)							JENIS KELAMIN (Org)	
			S3	S2	S1	D4	D3	SMA	<SMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A.	Pegawai Negeri Sipil										
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	0
2	Pejabat Eselon III	19	1	14	4	-	-	-	-	18	1
3	Pejabat Eselon IV	55	-	27	27	-	-	1	-	44	11
4	Pelaksana	163	-	25	115	3	14	4	2	90	73
5	Polisi Kehutanan	21	-	4	13	-	-	4	-	17	4
6	Penyuluh Kehutanan	33	-	6	23	1	-	3	-	18	15
7	Perencana	4	-	4	-	-	-	-	-	2	2
	Jumlah PNS	296	1	81	182	4	14	12	2	190	106
B.	Non Pegawai Negeri sipil										
1	Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD)	10	-	1	6	-	2	2	-	2	8
2	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	18	-	1	7	-	2	6	-	15	3
3	Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan (PPTPK)	16	-	-	13	-	-	4	-	10	6
4	Pegawai Tidak Tetap Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan (PTT Pamhut dan Dalkar)	72	-	-	-	-	-	72	-	58	14
	Jumlah Non PNS	116	0	2	26	0	4	84	0	85	31
	Jumlah PNS dan Non PNS	412	1	83	208	4	18	96	2	275	137

Sumberdata : Sekretariat September 2023

SDM berstatus PNS dan Non PNS berjumlah 412 orang. Proporsi gender di Dinas Kehutanan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki 275 orang (66,75%) dan pegawai perempuan 137 orang (33,25%). Lebih dari setengah pegawai dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berpendidikan S1 (208 orang, 50,49%), diikuti dengan S2 (83 orang, 20,15%), SLTA/ sederajat (96 orang, 23,3%), D4 dan D3 memiliki nilai yang sama (22 orang, 5,24%), dibawah SMA (2 orang, 1 %), dan paling sedikit S3 (1 orang, 0,3 %). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3. Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Dalam menjalankan fungsinya di lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 14 (empat belas) UPTD Kesatuan Pengelolaan hutan yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara seluas 3.457.859 ha (37,50% dari luas wilayah Provinsi Sumsel). UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura dan UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong memiliki jumlah pegawai yang paling banyak 32 dan 33 orang, sedang UPTD KPH Wilayah I Meranti memiliki jumlah pegawai yang paling sedikit yaitu 11 orang. Jumlah pegawai UPTD yang lainnya memiliki sebaran pegawai yang beragam 16 sampai dengan 25 orang di setiap KPH yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Luas wilayah kerja yang cukup besar tidak diimbangi dengan jumlah Polisi Hutan yang ada di setiap KPH, 10.000 Ha dipantau oleh 1 orang Polisi Kehutanan. Hal ini sangat tidak ideal karena hutan yang diawasi cukup luas. Meskipun telah ada penambahan tenaga pada UPTD KPH, tugas Polisi Kehutanan dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, namun belum cukup ideal. Jumlah yang tidak seimbang ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap gangguan hutan seperti illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar.

Salah satu solusi mengatasi permasalahan perambahan hutan, saat ini dapat diselesaikan melalui Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial merupakan hak akses kelola bagi masyarakat disekitar hutan. Pendekatan ini dapat bertujuan untuk melestarikan kawasan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan dengan ketentuan yang ada, sehingga UPTD didukung oleh pegawai dengan kompetensi Penyuluh dan Pegawai Pendamping Petugas Teknis kehutanan.

Dukungan prasarana Gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya memadai. Ruangan kantor masih berupa sewa gedung yaitu UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah di Lahat dan UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti di Baturaja. Kantor dinas induk dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) aula, ruang arsip, perpustakaan, mesjid, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, dan ruang konsultasi. Juga terdapat toilet ramah gender di masing-masing gedung. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi cukup baik.

Sarana kerja pada Kantor KPH juga belum memadai terutama sarana komputer dan transportasi. Kedua alat itu sangat penting untuk menunjang operasional UPTD dalam melaksanakan sosialisasi/patroli pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan, serta pendampingan masyarakat dalam Perhutanan Sosial.

Sementara itu, rasio personal computer dan/atau laptop dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk maupun UPTD KPH belum cukup memadai. Hal ini menjadi salah satu penghambat kecepatan pelayanan publik.

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Tetap				
1,1	Tanah				
1.1.1	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol II	14	1	15	
1.1.2	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol III	0	3	3	
1.1.3	Tanah Bangunan Gedung	0	0	0	
1.1.4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	28	32	
1.1.5	Tanah Kosong yang tidak digunakan	3	0	3	
1.1.6	Tanah Lapangan tenis	1	0	1	
1.1.7	Tanah Bangunan Pos Jaga	0	4	4	
1,2	Peralatan dan Mesin				
1.2.1	Jeep	6	2	8	
1.2.2	Mini Bus	8	2	10	
1.2.3	Mesin proses lain-lain	7	0	7	
1.2.4	Station Wagon	1	2	3	
1.2.5	Ranger double		1	1	
1.2.6	Kendaraan Dinas Bermotor (hibah)	1	1	2	
1.2.7	Pick Up	1	5	6	
1.2.8	Sepeda motor	42	150	192	
1.2.9	Kendaraan Roda tiga		34	34	
1.2.10	Portable water Pump	1	0	1	
1.2.11	Portabel Generating set	1	0	1	
1.2.12	Pompa lain-lain	4	0	4	
1.2.13	PC	19	24	43	
1.2.14	Laptop	9	44	53	
1.2.15	Notebook	16	21	37	
1.2.16	GPS	8	57	65	
1,3	Gedung dan Bangunan				
1.3.1	Rumah Negara Golongan 1	7	1	8	
1.3.2	Rumah Negara Golongan 2	2	5	7	
1.3.3	Rumah Negara Golongan 3	29	6	35	
1.3.4	Bangunan gedung Permanen	11	40	51	
1.3.5	Bangunan gedung Semi Permanen	0	4	4	
1.3.6	Pos jaga Permanen	0	6	6	
1,4	Jalan, Jaringan dan Irigasi				
1.4.1	Bangunan air bersih	1	0	0	
1,5	Aset tetap lainnya				
1,6	Kontruksi dalam pengerjaan	0	0	0	
2	Aset lainnya				
2,1	Kemitraan dengan pihak ke 3	0	0	0	
3	Aset Tidak berwujud				
3,1	Aset Tidak berwujud	NA	NA	NA	
4	Aset Lain-lain				
4,1	Aset Lain-lain	NA	NA	NA	

Sumberdata : Sekretariat Juli Tahun 2023

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Luas penanaman per tahun tidak sebanding dengan jumlah lahan kritis yang ada.
2. Kebakaran hutan masih sering terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan hutan.
3. Belum optimalnya fungsi kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Provinsi Sumatera Selatan
4. Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan.
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kehutanan sehingga dibutuhkan ASN/Non-ASN/Pegawai Tidak Tetap.
7. Sarana prasarana untuk pengelolaan hutan sudah tua dan minim akibat kurangnya atau tidak adanya alokasi pendanaan.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Susunan Organisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 41).

E. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tatakerja
- C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika
- F. Rekomendasi

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

D. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

E. Data Dukung Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kehutanan Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Rekomendasi

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	
a.	Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja	Dalam perencanaan kinerja agar : a. Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
b. c.	jangka Panjang, menengah dan pendek, dokumen perencanaan anggaran yang mendukung. Belum ada dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja Dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang telah diformalkan, dokumen jangka pendek belum dipublikasikan, dokumen kinerja telah menggambarkan Sebagian besar kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) sebagian besar telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja Sebagian kecil memenuhi kriteria SMART, IKU Sebagian kecil menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, dokumen perencanaan telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan, perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Sebagian besar perencanaan kinerja, setiap pegawai Sebagian kecil merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Anggaran yang ditetapkan Sebagian besar mengacu pada kinerja yang diinginkan, aktifitas yang dilaksanakan Sebagian kecil mendukung kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Sebagian kecil telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih on the right track, rencana aksi kinerja belum dapat	dipublikasikan. b. Indikator kinerja hendaknya memenuhi kriteria SMART c. IKU hendaknya menggambarkan kondisi kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis) d. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja hendaknya dapat dicapai, menantang dan realistic. e. Anggaran yang ditetapkan dapat mengacu pada kinerja yang ingin dicapai f. Setiap pegawai hendaknya dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	berjalan dinamis walaupun Evaluasi capaian kinerja sudah dilaksanakan tetapi RA telah disusun Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil Analisa perbaikan kinerja sebelumnya, terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, setiap unit/satuan kerja Sebagian besar yang memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan, setiap pegawai Sebagian kecil memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.	
2.	Pengukuran Kinerja	
a.	Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja Sudah ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Dalam melaksanakan pengukuran kinerja agar : 1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, untuk diturunkan dengan penguat dan ditindaklanjuti oleh OPD dengan membuat SOP. 2. Dilaksanakan berkala dan terstruktur 3. Dilakukan oleh seluruh unit kerja 4. Dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 5. Pelaksanaan didokumentasikan secara lengkap 6. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi informasi ditingkatkan lagi dari excel berumus menjadi aplikasi
b.	Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil Keputusan dalam capaian kinerja, data yang dikumpulkan Sebagian besar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, data kinerja yang dikumpulkan Sebagian besar mendukung capaian yang diharapkan, pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, Sebagian level dalam organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	
c.		

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, pengukuran kinerja sudah menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional, pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian organisasi, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktifitas, penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, Sebagian besar telah efisien atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, Sebagian unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, sebagian besar pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	7. Pengukuran kinerja hendaknya dapat mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. 9. Laporan kinerja berkala tentang capaian kinerja, bukan hanya realisasi fisik keuangan. 10. Seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	
a.	Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja Dokumen laporan kinerja telah disusun, disusun secara berkala, telah diformalkan, namun belum direviu oleh APIP, belum dipublikasikan tepat waktu, belum disampaikan tepat waktu.	Dalam pengukuran kinerja agar menghasilkan : 1. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, diantaranya belum memuat :
b.	Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja Dokumen laporan kinerja Sebagian besar telah disusun secara berkualitas sesuai standar, sebagian besar mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja, informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak menginformasikan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau	a) Informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. b) Informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja c) Informasi tentang upaya

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
c.	hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja, telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepeduliam Sebagian besar pimpinan dan pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktifitas, penyesuaian penggunaan anggaran, Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, serta selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. 2. Dokumen laporan kinerja hendaknya dipublikasikan tepat waktu 3. Melakukan reviuw Laporan Kinerja (LKjIP) Internal Tahun 2023
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
a.	Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan oleh APIP, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	1. Menindaklanjuti hasil Evaluasi internal 2. Perbaikan dan peningkatan akuntabilitas ke depan
b.	Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standart, oleh SDM yang memadai, dengan pendalaman yang memadai, dilaksanakan pada seluruh unit kerja,dan menggunakan teknologi informasi/aplikasi.	
c.	Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Rekomendasi atas hasil Evaluasi akuntabilitas internal Sebagian kecil telah ditindaklanjuti, terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasail Evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas	

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	dan efisiensi kinerja, telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pembangunan kehutanan kedepan dalam pengelolaannya lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Di Sumatera Selatan pengelolaan sektor kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu pengelolaan yang berorientasi pada kayu menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam. Selain itu dalam pengelolaan hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi provinsi yaitu :

“Sumsel Maju Untuk Semua”

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merumuskannya dalam empat misi provinsi. Keempat misi Provinsi Sumatera Selatan tersebut yaitu :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki- laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dengan sasaran:
 1. Maju ekonomi kerakyatan;
 2. Maju investasi, industri, dan perdagangan;
 3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan pangan;
 4. Maju Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran:
 1. Maju Kesehatan Masyarakat;
 2. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
 3. Investasi di Provinsi Sumatera Selatan meningkat.
- c. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan sasaran: Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak;
- d. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran:
 1. Maju Pelayanan Publik berkualitas;
 2. Maju Pembangunan yang transparan dan akuntabel;
 3. Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan sasaran:
 1. Maju Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Maju Infrastruktur dan Konektivitas;
- f. Mewujudkan masyarakat madani dengan sasaran; Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Kehidupan Beragama.
- g. Meningkatkan daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi dengan sasaran; Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata.
- h. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga dengan sasaran; Maju pemuda dan olahraga.

Dalam upaya mencapai visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terkait pada :

Misi 1 : Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun dipedesaan,

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsive,

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Berdasarkan hasil penjabaran kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mendukung tujuan Pemerintah Daerah yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan sasaran maju Kualitas Lingkungan Hidup. Terkait dengan hal ini tujuan jangka menengah (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan tata kelola kawasan hutan yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perlindungan hutan secara kolaboratif dan partisipatif
3. Meningkatkan luas rehabilitasi hutan dan lahan
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pelestarian hutan
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Sesuai dengan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai, maka telah ditetapkan sasaran pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBP serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan
2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya
3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan
4. Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan
5. Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik

Dalam perjalanannya, pada tahun 2021 dokumen perencanaan daerah jangka menengah ini terdapat perubahan dan penyesuaian mempertimbangkan isu dan permasalahan yang terjadi yaitu dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan berbagai regulasi terbaru, sehingga ditetapkannya

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023.

Sebagai turunan dari RPJMD, Rencana Strategis Perangkat juga dilakukan perubahan dan penyesuaian. Dari dokumen Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2021 terdapat perubahan indikator kinerja Dinas Kehutanan. Indikator kinerja periode tahun 2019-2020 menjadi indikator kinerja periode tahun 2021 - 2023, yaitu :

1. Produksi kayu sub sektor kehutanan
2. Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan
3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan
4. Jumlah Peta Tematik yang KSP
5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi
6. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)
7. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan
8. Penurunan luas kebakaran hutan
9. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
10. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
11. Jumlah kasus yang tertangani
12. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			TUJUAN/SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan penerimaan sub sektor kehutanan	1 Meningkatkan produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan.	Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan	73.761 ha	18.500 ha	18.500 ha	18.500 ha	12.350 ha	12.350 ha
			Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	5.471.085,50	5.500.000	5.600.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
			Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	68.141.980.591	42.400.000.000	44.000.000.000	45.500.000.000	47.000.000.000	50.000.000.000
			Jumlah peta tematik yang KSP	0	0	1	1	1	1
2	Meningkatkan perlindungan hutan secara kolaboratif dan partisipatif	2 Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan	320 titik api	791 titik api	662 titik api	555 titik api	464 titik api	389 titik api
			Penurunan luas kebakaran hutan	10.135 ha	9121,5 ha	8209,35 ha	7388,42 ha	6649,6 ha	5984,6 ha
			Jumlah kasus yang tertangani	5	3	3	3	3	3
			Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
			Persentase penurunan emisi sektor kehutanan	1,56%	1,60%	1,64%	0	0	0
3	Meningkatkan luas rehabilitasi hutan dan lahan	3 Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,16%	0,18%	0,19%	0	0	0
			Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0	0	0	0,14%	0,16%	0,17%
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	0,30%	0,27%	0,24%	0	0	0

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			TUJUAN/SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0	0	0	0,22%	0,19%	0,17%
4	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pelestarian hutan	4 Meningkatkan akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	Jumlah izin perhutanan sosial	91	5	10	0	0	0
			Jumlah penetapan hutan hak	1	1	1	0	0	0
			Jenis Sapras HHBK	2	2	3	0	0	0
			Jenis HHBK yang dikembangkan	3	0	3	0	0	0
			Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	0	0	0	5%	5%	5%
5	Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)	5 Meningkatkan kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	53,49%	100%	100%	0	0	0
			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	82,69%	100%	100%	0	0	0
			Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	100%	100%	0	0	0
			Persentase peningkatan disiplin aparatur	0	0	100%	0	0	0
			Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/berkembang	0	100%	100%	0	0	0
			Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai berikut :

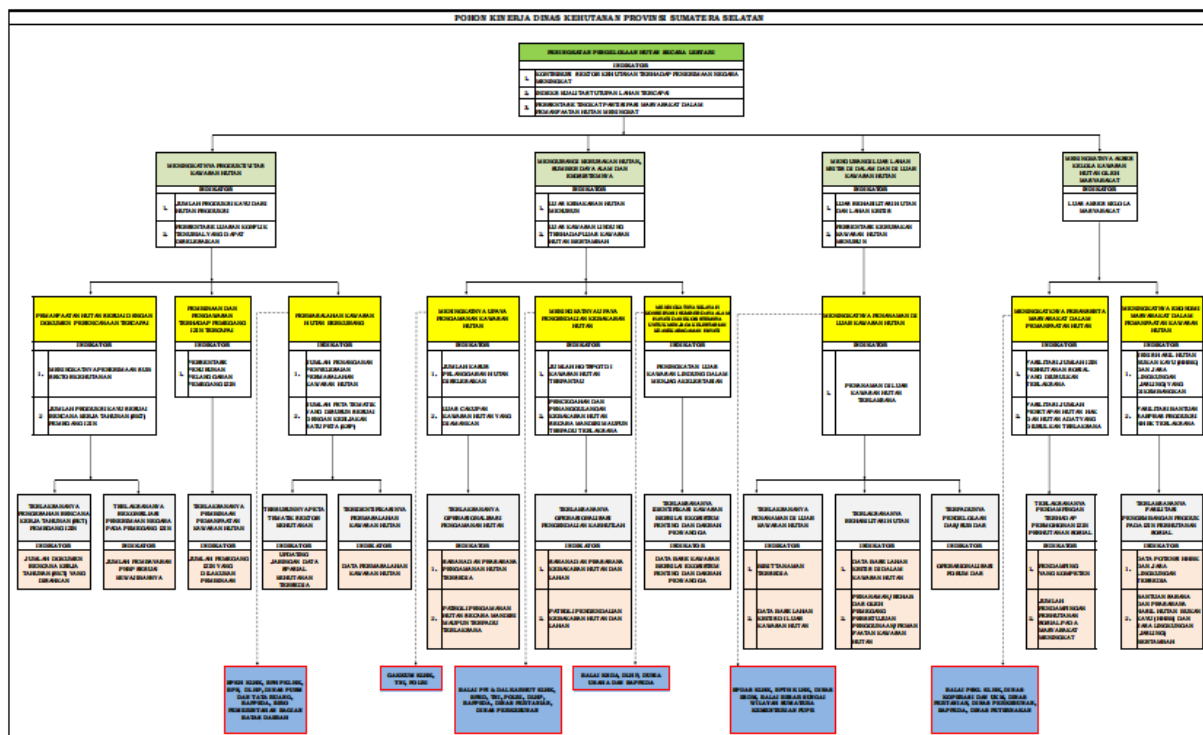
Tabel 7 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target
I	Meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan penerimaan sub sektor kehutanan	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1.	Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (ha)	12.350
			2.	Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	6.000.000
			3.	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50.000.000.000
			4.	Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1
II	Meningkatkan perlindungan hutan secara kolaboratif dan partisipatif	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5.	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	0,17
			6.	Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	0,17
			7.	Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	389
			8.	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio)	5984,6
III	Meningkatkan luas rehabilitasi hutan dan lahan	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	3
			10.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) (%)	0,44

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target
IV	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pelestarian hutan	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	5
V	Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100

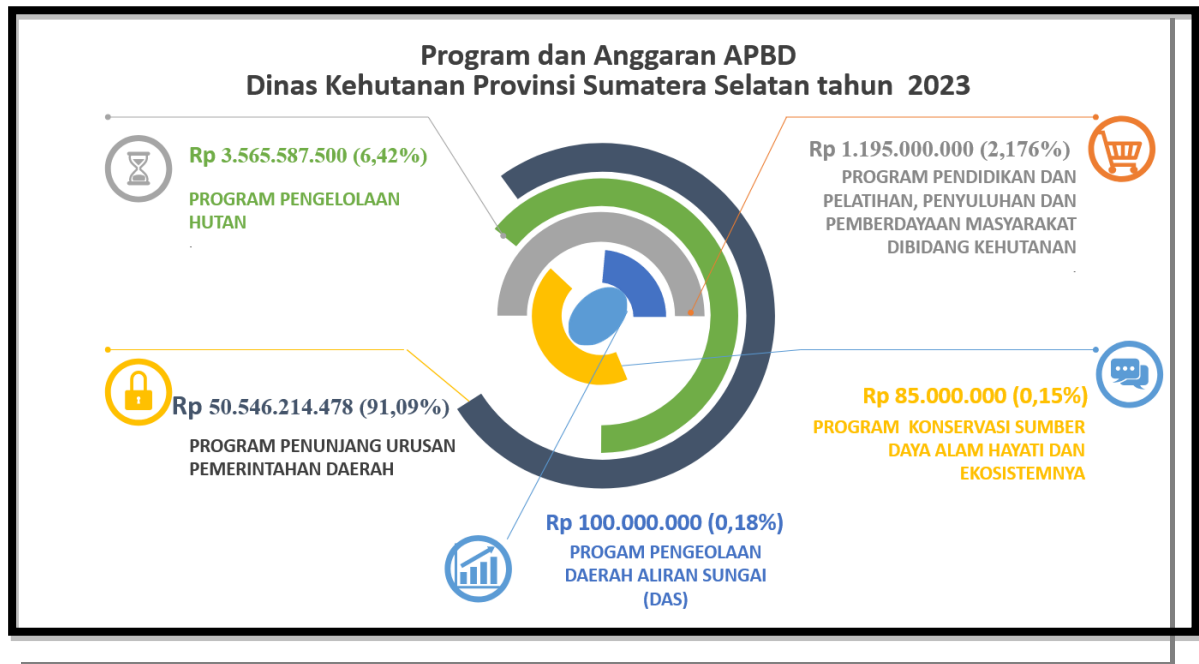
Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis (Pohon Kinerja /Cascading). Skema pohon kinerja bertujuan mencari atau menentukan akar permasalahan, diharapkan mendapatkan fokus kinerja yang menjadi prioritas.



Gambar 4. Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 didukung anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada Rencana Kerja Tahun 2023, terdapat perbedaan target dari Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2018-2023 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. Alokasi anggaran tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Induk yang ditetapkan sebagaimana DPA Nomor DPPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 3 Januari 2022. Selama tahun 2023 terdapat beberapa kali perubahan DPPA yaitu Perubahan mendahului Perkada, Perubahan pada APBD-P, Perubahan Hasil Refokusing Pertama, dan Perubahan Hasil Refokusing Kedua. Pada refocusing kedua menambahkan anggaran biaya tak terduga sebesar Rp. 250.000.000,-, sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan menjadi Rp 55.491.801.978,00.



Gambar 5. Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Berdasarkan perubahan sebagaimana tersebut di atas, Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sesuai pagu dan indikator output sub kegiatan dirinci sebagai berikut :

Tabel 8 Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					50.546.214.478
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU dan melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan	150.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan UPTD serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja	200.000.000
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41.857.505.500
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	310	Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	41.424.385.500
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,00	Menyiapkan pembayaran honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengelola barang dan jasa	253.120.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12,00	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	180.000.000
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000,00
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengamanan Aset SKPD	1,00	Melaksanakan pengamanan BMD	100.000.000,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				248.000.000,00
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11,00	Menyiapkan pembayaran peningkatan SDM /diklat Polhut di KLHK	198.000.000,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.666.000.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Menyiapkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor/bangunan	90.000.000,00
vi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				425.000.000,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,00	Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.000.000,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Menyiapkan Penyediaan ATK pada Dinas dan UPTD	185.000.000,00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Menyiapkan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00	Menyiapkan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	6.000.000,00
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Menyiapkan konsumsi atas kunjungan tamu dan rapat Dinas Kehutanan	160.000.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,00	Menyiapkan bahan /melakukan koordinasi dan konsultasi/rapat pembangunan kehutanan pada tingkat Dinas dan UPTD	1.544.000.000,00
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	Menyiapkan publikasi/kampanye melalui aktivasi media digital dan pengembangan dan pemeliharaan website OPD	70.000.000,00
vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2,00	Menyewa gedung kantor untuk UPTD KPH XI dan KPH VI	40.000.000,00
viii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.366.908.978,
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di Dinas dan UPTD	22.000.000,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	613.155.978,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jaga malam, Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kehutanan, Tenaga administrasi dan Tenaga operator komputer, dan instruktur senam.	3.731.753.000
ix	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				917.800.000,00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22,00	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, pajak kendaraan, asuransi, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	786.000.000,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60,00	Menyediakan pemasangan dan pemeliharaan absensi kepegawaian, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas dan UPTD.	131.800.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					3.565.587.500
i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				100.000.000,00
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1,00	Mengumpulkan/ identifikasi data permasalahan kawasan hutan dan koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi kawasan kepada para pihak (KPH dan Kabupaten)	100.000.000,00
ii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				457.487.500,00
24	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1,00	Menyusun statistik kehutanan, Menyusun peta tematik kehutanan, melakukan updating data penutupan lahan di KPH, melakukan optimalisasi PNBPNBP /rekonsiliasi penerinmaan PNBPNBP SDA Kehutanan	102.500.000,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1,00	Melakukan monitoring dan evaluasi peredaran hasil hutan dan pembinaan RKT PBPH/IPPKH	145.000.000,00
26	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah lokasi Peningkatan Sarana Prasarana Jasa Lingkungan	1,00	Memberikan bibit pohon/ MPTS/tanaman buah kepada KTH di wilayah kerja UPTD KPH XIII	209.987.500,00
iii	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				795.000.000,00
27	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (ha)	10,00	Memberikan bantuan bibit pohon/ tanaman MPTS dan buah untuk masyarakat dan kelompok tani di wilayah kerja UPTD KPH II, V, VI, dan XI serta melakukan monitoring dan verifikasi lapangan, penerbitan sertipikat standart pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar serta evaluasi urusan perbenihan tanaman hutan.	645.000.000,00
28	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6,00	Melakukan pengendalian dan pembinaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan di UPTD KPH	150.000.000,00
iv	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				2.213.100.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
29	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (ha)	300,00	Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran hukum/ pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan dan melaksanakan kegiatan latihan menembak bagi petugas /polhut.	222.500.000
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	15,00	Koordinasi dan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melakukan pembinaan dan monev kepatuhan PBPH dalam dalkarhutlah, Melakukan pengecekan Burnscar dan Hotspot, Pembuatan peta burnscar dan mengelola aplikasi songket pada Dinas, serta Melaksanakan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan pada UPTD KPH Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	1.990.600.000
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					85.000.000
i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				85.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
31	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan (kelompok)	2,00	Melaksanakan Sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan konflik manusia dan satwa liar dengan parapihak BKSDA KPH PBPH dan membagikan leaflet kepada masyarakat	85.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					1.195.000.000
i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				1.195.000.000
32	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44,00	Melakukan pembinaan/ bimbingan teknis dan monitoring penyuluh di UPTD dan penyusunan program tingkat KPH.	50.000.000
33	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	14,00	Memberikan bantuan alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani hutan, Melakukan penilaian kelas kelompok Perhutanan Sosial dan Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial di Wilayah UPTD KPH.	980.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5
34	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (ha)	100,00	melaksanakan Fasilitasi kelompok perhutanan sosial/penanganan konflik tenurial dan melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan hak.	165.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRANSUNGAI (DAS)					100.000.000
i	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100.000.000
35	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS (lokasi)	6,00	Pembinaan dan pemantauan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) Pemegang IPPKH di wilayah UPTD KPH	100.000.000
	Jumlah : 5 Program, 15 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan				55.491.801.978

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2023 tergambar dalam dokumen perjanjian kinerja yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun serta dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang telah disesuaikan pada tahun yang bersangkutan. Melalui perjanjian kinerja diharapkan dapat mewujudkan komitmen komitmen yang tercermin dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama satu tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2023 dan telah disesuaikan dengan Permendagri 18 Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (Ha)	12.350
		2. Produksi kayu sub sektor kehutanan (m ³)	6,0 jt
		3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50 M

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target
		4. Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	389
		6. Penurunan luas kebakaran hutan (Ha)	5984.60
		7. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	3
		8. Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio)	0,44
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,17
		10. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	0,17
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	5
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100

Perjanjian kinerja ini dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada program-program bidang kehutanan yang berkaitan dengan peningkatan produksi kayu dan penerimaan negara dari subsektor kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penurunan kerusakan kawasan hutan, penurunan luas kebakaran hutan, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan.

Perjanjian kinerja dan target OPD dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari Kepala OPD ke Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala UPTD / Fungsional Madya ke Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Fungsional Muda ke pelaksana / Fungsional Pertama (individu).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian dengan tahun sebelumnya dan target yang ingin dicapai pada periode akhir RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja yang diukur dalam LKjIP adalah capaian kinerja indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Namun capaian kinerja sasaran strategis dipengaruhi pula oleh capaian kinerja kegiatan, oleh sebab itu maka pengukuran kinerja kegiatan merupakan salah satu bagian dari proses penghimpunan data dalam pengukuran kinerja sasaran strategis. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcomes (hasil).

Tingkat pencapaian kinerja sasaran merupakan pencapaian target dari indikator sasaran dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Pencapaian tingkat kinerja sasaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja berupa persentase capaian kinerja diberi makna dengan skala ordinal peringkat kinerja sebagai berikut :

1. >100% =Sangat Tinggi;
2. 75% -100%= Tinggi;

3. 55% - 75%=Sedang; dan
4. <55%= Rendah.

Evaluasi kinerja merupakan salah satu bahan masukan dalam perencanaan kinerja periode yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kinerja sasaran, program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dengan target, membandingkan dengan kinerja dengan tahun sebelumnya, membandingkan dengan target periode akhir dan membandingkan dengan kinerja pemerintah pusat (KLHK).

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat diketahui dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja utama sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Capaian Indikator kinerja utama pada tahun 2023 sebagaimana pada tertera pada tabel menunjukkan bahwa pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dan dapat dimaknai sebagai pencapaian kinerja **“Sangat Tinggi”**. Kinerja yang **“Rendah”** terdapat pada 3 (tiga) Indikator yakni penurunan luas kebakaran hutan, penurunan hotspot dan penurunan deforestasi. Pencapaian ketiga indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan kondisi lahan wilayah Sumatera Selatan. Faktor iklim seperti suhu udara, curah hujan, kelembaban, radiasi matahari, dan kecepatan angin dapat menjadi pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena dapat berpengaruh terhadap tingkat kekeringan wilayah (Wibowo 2003). Lahan gambut lebih rentan terbakar dibandingkan lahan mineral.

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBPN serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam	12.350	21.593,22	174,84
		2. Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	6.000.000	11.203.220,45	186,72
		3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50.000.000.000	129.069.761.521	258,14
		4. Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1	1	100,00
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	389	-3.772	-969,67
		6. Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	5.984,60	-1546,79	-25,85
		7. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	3,00	7	233,33
		8. Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan	0,44	0,465	105,68
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,17	0,27	158,82
		10. Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) (%)	0,17	0,05	29,41
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	5,00	83,33	1.666,60
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Kinerja Dinas Kehutanan juga dapat dilihat melalui perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada Tabel berikut disajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir perencanaan Renstra tahun 2019-2023 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 yang merupakan tahun keempat perencanaan periode Renstra tahun 2019-2023.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2022			Perbandingan tahun 2023 terhadap Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (ha)	12.350	21.593,22	174,84	12.350	21.755	176,15	99,26	99,26
		2. Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	6.000.000	11.203.220,45	186,72	5.900.000	9.614.736,06	162,96	116,52	114,58
		3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50.000.000.000	129.069.761.521,00	258,14	47.000.000.000	89.062.951.583	189,50	144,92	136,22
		4. Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00	100,00
2.	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan	389,00	-3.772,00	-969,67	464	1976,77	426,03	-190,82	-227,61
		6. Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	5.984,60	-1.546,79	-25,85	6.649,60	1.112,00	16,72	-139,10	-154,56
		7. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	3	7,00	233,33	3	3	100,00	233,33	233,33
		8. Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan	0	0,47	105,68	0,44	0,46	104,55	101,09	101,09
3.	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,17	0,27	158,82	0,16	0,33	205,61	82,07	77,24
		10. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	0,17	0,05	29,41	0,19	0,04	21,05	125,00	139,71
4.	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat	11. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	5,00	83,33	1.666,60	5	63,33	1266,60	131,58	131,58
5.	Meningkatnya kinerja ASN	12. Persentase pemenuhan layanan kinerja	100	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja utama Tahun 2023 terhadap target dan realisasi Tahun 2022 sebagaimana pada tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian 8 (delapan) indikator kinerja di atas 100% dimaknai sebagai pencapaian **“Sangat Tinggi”** yaitu Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3), penerimaan sub sektor kehutanan (Rp), Jumlah peta tematik yang KSP (tematik), Jumlah kasus yang tertangani (kasus), Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio), penurunan kerusakan hutan(%), peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%) dan Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%).

Kinerja yang **“Tinggi”** pada pencapaian realisasi maupun capaiannya pada indikator luas penyelesaian lahan (ha) dan luas lahan kritis yang direhabilitasi (%).

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator penurunan lahan kritis lebih besar dibandingkan dengan tahun lain. Sedangkan untuk luas penyelesaian permasalahan tergantung pada luasan konflik pada masing-masing kabupaten yang dilakukan proses penyelesaiannya.

Sedangkan kategori **“Rendah”** pada penurunan luas kebakaran hutan dan penurunan hotspot. Kondisi iklim tahun 2023 lebih kering dibandingkan tahun 2022, sehingga kejadian kebakaran hutan lebih tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kehutanan selama periode Renstra ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahun dalam dokumen perencanaan. Target kinerja yang ditetapkan setiap tahun merupakan parameter keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam 5 tahun periode Renstra, sehingga dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja pada periode Renstra yang akan datang.

Capaian Indikator kinerja utama pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra sebagaimana tertera pada tabel menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target akhir Renstra. **“Kinerja Sangat Tinggi”** terhadap pencapaian target akhir Renstra pada 9 (sembilan) indikator yakni Luas penyelesaian permasalahan Kawasan Hutan (ha), Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3), penerimaan sub sektor kehutanan (Rp), Jumlah peta tematik yang KSP (tematik), Jumlah kasus yang tertangani (kasus), Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio), penurunan kerusakan hutan(%), peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%) dan Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%).

“Kinerja Sedang” terhadap pencapaian target akhir Renstra pada luas lahan kritis yang direhabilitasi (%) dan **“Kinerja Rendah”** pada penurunan luas kebakaran hutan dan penurunan hotspot. Terhadap indikator kinerja terkait kebakaran hutan, upaya-upaya telah dilakukan untuk mendukung kinerja seperti penetapan system dan mekanisme pengendalian kebakaran hutan, penguatan SDM pengendalian hutan dan patroli kebakaran hutan. Namun demikian, kondisi iklim kekeringan dan lahan gambut tetap tidak dapat sepenuhnya diintervensi sehingga yang dapat dilakukan hanya memperkecil dampak akibat kebakaran hutan, misalnya asap tidak meluas sampai ke negara tetangga.

Berikut ini disajikan Tabel 4 yang berisikan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target tahun akhir Renstra tahun 2023.

Tabel 12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Capaian (%)
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (ha)	170.401	80.200	212,47
		2. Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	11.203.220,45	6.000.000	186,72
		3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan	129.069.761.521	50.000.000.000	258,14
		4. Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	3	3	100
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	-3.772,00	389	-969,67
		6. Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	-1.546,79	5.984,60	-25,85
		7. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	16	15	107
		8. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (rasio)	0,46	0,44	104,55
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,27	0,47	57,45
		10. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	0,05	0,17	340,00
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	53,90	37,65	143,15
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	500	500	100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Merujuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, capaian indikator nasional belum dipublikasikan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah dibidang kehutanan. Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta solusi yang sudah dilaksanakan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 13 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1.	Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (ha)	12.350	21.593,22	174,84	Berhasil 1. Masih tingginya keinginan masyarakat terhadap pengelolaan lahan kawasan hutan, namun belum mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. 2. Adanya komitmen yang kuat Gubernur Sumatera Selatan dalam mendukung penyelesaian permasalahan lahan masyarakat dalam kawasan hutan	Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten tentang peraturan penyelesaian permasalahan lahan dan pemukiman dalam kawasan hutan dan identifikasi lahan yang bermasalah.
		2.	Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	6.000.000	11.203.220,45	186,72	Berhasil. Belum terealisasinya dengan baik pelaksanaan kegiatan multi usaha dibidang kehutanan pada masing-masing Perizinan Berusaha Pemanfaatan	Melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
							Hutan.	
		3.	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50.000.000.000	129.069.761.521	258,14	Berhasil Adanya komitmen Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan Persetujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan produktifitas lahannya dan kepatuhannya membayar PNBP	Melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan rekonsiliasi dengan KLHK
		4.	Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1	1	100,00	Berhasil Peta Penutupan hutan belum sinkron dengan penutupan lahan sektor lain	Melakukan penyusunan peta tematik dengan menggunakan data yang update dari berbagai sektor yang terkait dengan lahan.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5.	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	389	-3.772	-969,67	Kurang Berhasil Masih adanya anggapan masyarakat membuka lahan untuk bercocok tanam dengan cara membakar dapat menambah kesuburan tanah, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul.	Upaya maksimal telah dilakukan melalui management pengendalian kebakaran hutan melalui patroli dalkar, namun banyaknya hotspot lebih dipengaruhi oleh faktor kondisi alam dan musim kemarau yang kering dan panjang.
		6.	Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	5.984,60	-1546,79	-25,85	Kurang Berhasil Masih adanya anggapan masyarakat membuka lahan untuk bercocok tanam dengan cara membakar dapat menambah kesuburan tanah, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul.	Upaya maksimal telah dilakukan melalui pemadaman darat kebakaran hutan, namun belum mampu menuntaskan permasalahan terutama pada lahan gambut.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
		7.	Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	3,00	7	233,33	Berhasil Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kehutanan dan penegak hukum lainnya. Adanya peningkatan kapasitas Polhut dan PPNS	Melakukan patroli pengamanan hutan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran hutan oleh Polhut dan PPNS terlatih.
		8.	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio)	0,44	0,465	105,68	Berhasil Adanya pembinaan terhadap PBPH dalam pengelolaan kawasan konservasi di areal kerjanya.	Melakukan sosialisasi konflik satwa dan manusia, koordinasi dengan pemerintah kabupaten tentang penanganan konflik.
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,17	0,27	158,82	Berhasil Anggaran untuk penyediaan bibit yang berkualitas sangat minim dibandingkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi	Melakukan pembagian bibit MPTS kepada masyarakat dan kelompok tani hutan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
		10.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) (%)	0,17	0,05	29,41	Kurang Berhasil Kerusakan hutan disebabkan adanya pembukaan lahan, alih fungsi hutan, kebakaran hutan	Pelibatan Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat lainnya untuk melakukan penanaman pada lahan kritis lahan kritis
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	5,00	83,33	1.666,60	Berhasil Masyarakat yang telah berusaha didalam kawasan hutan membutuhkan legalitas dari Menteri LHK Adanya peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial dan penambahan jumlah pendamping kelompok tani hutan.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan usulan perhutanan sosial kepada masyarakat yang terlanjur mengelola lahan dalam kawasan hutan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00	Berhasil Operasionalisasi terutama pada KPH kurang memadai	Melakukan pemenuhan operasionalisasi kantor, diklat ASN, pengamanan aset, tenaga pendamping petugas teknis Kehutanan, Pegawai Tidak Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan, Reward dan punishment ASN

Analisis keberhasilan /kegagalan pada tabel di atas menunjukkan upaya atau solusi mendukung ketercapaian kinerja. Solusi tersebut sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten tentang peraturan penyelesaian permasalahan lahan dan pemukiman dalam kawasan hutan dan identifikasi lahan yang bermasalah, sehingga diperoleh data usulan Gubernur tentang pola penyelesaian permasalahan lahan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dimaksudkan meningkatkan produksi kayu.
3. Melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan rekonsiliasi dengan KLHK mengenai kepatuhan membayar kewajibannya kepada Negara.
4. Melakukan penyusunan peta tematik dengan menggunakan data yang update dari berbagai sektor yang terkait dengan lahan, sehingga keterpaduan data/peta pada sektor kehutanan terpenuhi sehingga dapat mendukung kinerja lainnya.
5. Upaya maksimal telah dilakukan melalui management pengendalian kebakaran hutan melalui patroli dalkar dan pemadaman darat kebakaran hutan, namun banyaknya hotspot dan kebakaran hutan lebih dipengaruhi oleh faktor kondisi alam dan musim kemarau yang kering dan Panjang terutama pada lahan gambut.
6. Melakukan patroli pengamanan hutan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran hutan oleh Polhut dan PPNS terlatih.
7. Melakukan sosialisasi konflik satwa dan manusia, koordinasi dengan pemerintah kabupaten tentang penanganan konflik.
8. Melakukan pembagian bibit MPTS kepada masyarakat dan kelompok tani hutan
9. Pelibatan Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat lainnya untuk melakukan penanaman pada lahan kritis lahan kritis
10. Melakukan sosialisasi dan pendampingan usulan perhutanan sosial kepada masyarakat yang terlanjur mengelola lahan dalam kawasan hutan
11. Melakukan pemenuhan operasionalisasi kantor, diklat ASN, pengamanan aset, tenaga pendamping petugas teknis Kehutanan, Pegawai Tidak Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan, Reward dan punishment ASN

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh setiap OPD. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2023 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.546.214.478,00	48.381.183.869,00	95,72
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000,00	347.129.458,00	99,18
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	148.159.547,00	98,77
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	198.969.911,00	99,48
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.857.505.500,00	39.943.991.798,00	95,43
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.424.385.500	39.518.066.314,00	95,40
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	253.120.000,00	247.060.000,00	97,61
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	180.000.000,00	178.865.484,00	99,37
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.746.064,00	99,75
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	99.746.064,00	99,75
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.000.000,00	246.356.756,00	99,34
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	48.356.756,00	96,71
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.666.000.000,00	2.646.421.467,00	99,27

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.000.000,00	89.952.933,00	99,95
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.000.000,00	420.065.000,00	98,84
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.000.000,00	85.224.900,00	99,10
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.000.000,00	182.575.598,00	98,69
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	94.633.632,00	94,63
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	5.940.000,00	99,00
	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.000.000,00	159.315.000,00	99,57
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.544.000.000,00	1.539.450.404,00	99,71
	17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000,00	69.264.000,00	98,95
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.366.908.978,00	4.214.047.784,00	96,50
	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	16.357.505,00	74,35
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	613.155.978,00	492.937.279,00	80,39
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.731.753.000,00	3.704.753.000,00	99,28
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	917.800.000,00	843.490.542,00	91,90
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	786.000.000,00	724.301.677,00	92,15
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.800.000,00	119.188.865,00	90,43
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		3.565.587.500,00	3.497.935.496,00	98,10
	i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	98.309.764,00	98,31
	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	100.000.000,00	98.309.764,00	98,31

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	ii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	457.487.500,00	445.801.593,00	97,45
	25	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	102.500.000,00	98.916.857,00	96,50
	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	145.000.000,00	143.707.236,00	99,11
	27	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	209.987.500,00	203.177.500,00	96,76
	iii	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	795.000.000,00	791.186.671,00	99,52
	28	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	645.000.000,00	642.227.261,00	99,57
	29	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150.000.000,00	148.959.410,00	99,31
	iv	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.213.100.000,00	2.162.637.468,00	97,72
	30	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	222.500.000,00	217.395.098,00	97,71
	31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.990.600.000,00	1.945.242.370,00	97,72
III	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		85.000.000,00	82.039.566,00	96,52
	i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	85.000.000,00	82.039.566,00	96,52
	32	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	85.000.000,00	82.039.566,00	96,52
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		1.195.000.000,00	1.064.286.454,00	89,06
	i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.195.000.000,00	1.064.286.454,00	89,06

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	33 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	50.000.000,00	47.675.015,00	95,35
	34 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	980.000.000,00	852.030.430,00	86,94
	35 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	165.000.000,00	164.581.009,00	99,75
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	100.000.000,00	99.524.626,00	99,52
	i Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	99.524.626,00	99,52
	36 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	100.000.000,00	99.524.626,00	99,52
	Jumlah : 5 Program, 15 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan	55.491.801.978,00	53.124.970.011,00	95,73

Dinas Kehutanan sebagai pelaksana urusan pilihan bidang kehutanan pada tahun 2022 mempunyai alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 55.491.801.978,-. dan terealisasi sebesar Rp 53.124.970.011,00,- (95,73%) meliputi Belanja Operasi Rp 52.704.905.011,- (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) atau sebesar 95,71 % dan Belanja Modal Rp 420,064.000,- atau sebesar 98,84%.

Capaian anggaran program dan kegiatan rata-rata mendekati 100%. Beberapa kegiatan yang tidak mencapai 90 % sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi keuangan lebih rendah dari realisasi fisiknya (100%) hal ini disebabkan adanya pengiriman surat secara online.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini terdapat kelebihan anggaran dari penyediaan Listrik, secara fisik telah terpenuhi 100 %. Hal ini karena pada beberapa kantor KPH menggunakan system token prabayar sehingga prediksi dana yang tersedia tidak sesuai.

2. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

1) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Pada Sub kegiatan ini terdapat kelebihan anggaran untuk pengadaan alat ekonomi produktif yang diberikan kepada kelompok tani, namun secara fisik kualitas dan kuantitas alat telah terpenuhi.

Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran menggunakan rumus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/Pmk.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Pengukuran Efisiensi Dilakukan Dengan Membandingkan Penjumlahan Dari Selisih Antara Perkalian Pagu Anggaran Keluaran Dengan Capaian Keluaran Dan Realisasi Anggaran Keluaran Dengan Penjumlahan Dari Perkalian Pagu Anggaran Keluaran Dengan Capaian Keluaran. Perhitungan efisien. Tingkat Efisiensinya dikategorikan sebagai berikut :

Nilai Efisiensi > 70%	: Sangat Efisien
Nilai Efisiensi 70 % - 60 %	: Efisien
Nilai Efisiensi 60 % - 50%	: Cukup Efisien
Nilai Efisiensi <50%	: Kurang Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel berikut. Dari perhitungan, diketahui 10 indikator kinerja menggunakan anggaran untuk menunjang indikator kinerja cukup efisien. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial sangat efisien memperoleh 16 kali dari target. Hal ini didukung oleh capaian kegiatan/sub kegiatan yang kinerjanya sangat efisien yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan dan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.

Pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah sebagai pendukung core bisnis Dinas Kehutanan dikategorikan efisien. Efisien terdapat pada belanja pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan pembayaran pajak, dan Penghematan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Capaian Program/Kegiatan/sub Kegiatan terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan lainnya menunjukkan rata-rata cukup efisien.

Tabel 15 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Capaian (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi		
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1.	Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (ha)	174,84	100.000.000	98.309.764	98,31	1,69	54,23	Cukup Efisien
		2.	Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	186,72	319.987.500	312.800.327	97,75	2,25	55,62	Cukup Efisien
		3.	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	258,14	35.000.000	34.024.409	97,21	2,79	56,97	Cukup Efisien
		4.	Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	100,00	102.500.000	98.916.857	96,50	3,50	58,74	Cukup Efisien
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5.	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	-969,67	1.990.600.000	1.945.242.370	97,72	2,28	55,70	Cukup Efisien
		6.	Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	-25,85	1.990.600.000	1.945.242.370	97,72	2,28	55,70	Cukup Efisien
		7.	Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	233,33	222.500.000	217.395.098	97,71	2,29	55,74	Cukup Efisien
		8.	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio)	105,68	85.000.000	82.039.566	96,52	3,48	58,71	Cukup Efisien

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Capaian (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi		
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	158,82	895.000.000	890.711.297	99,52	0,48	51,20	Cukup Efisien
		10.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) (%)	29,41	2.213.100.000	2.162.637.468	97,72	2,28	55,70	Cukup Efisien
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	1.666,60	1.195.000.000	1.064.286.454	89,06	10,94	77,35	Sangat Efisien
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	50.546.214.478	48.381.183.869	95,72	4,28	60,71	Efisien

Tabel 16 Perbandingan Capaian Program/Kegiatan/sub Kegiatan terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dok	3 Dok	300	100.000.000	98.309.764	98,31	1,69	54,23	Cukup Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dok	1 Dok	100	145.000.000	143.707.236	99,11	0,89	52,23	Cukup Efisien
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Peningkatan Sarana Prasarana Jasa Lingkungan			100	209.987.500	203.177.500	96,76	3,24	58,11	Cukup Efisien
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dok	1 Dok	100	102.500.000	98.916.857	96,50	3,50	58,74	Cukup Efisien
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Lap	15 Lap	100	1.990.600.000	1.945.242.370	97,72	2,28	55,70	Cukup Efisien
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300	280 Ha	97,80	222.500.000	217.395.098	97,71	2,29	55,74	Cukup Efisien
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA										
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam										
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	2 Klp	2 Klp	100	85.000.000	82.039.566	96,52	3,48	58,71	Cukup Efisien
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	17 Ha	24,434 Ha	141,18	645.000.000	642.227.261	99,57	0,43	51,07	Cukup Efisien
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi	12 Lap	12 Lap	100	150.000.000	148.959.410	99,31	0,69	51,73	Cukup Efisien

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
	Lahan									
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS	8 Lokasi	9 Lokasi	112,5	100.000.000	99.524.626	99,52	0,48	51,19	Cukup Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Lap	15 Lap	0,98	1.990.600.000	1.945.242.370	97,72	2,28	55,70	Cukup Efisien
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	280 Ha	100	222.500.000	217.395.098	97,71	2,29	55,74	Cukup Efisien
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang	54 Orang	122,73	50.000.000	47.675.015	95,35	4,65	61,62	Sangat Efisien
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	28 KTH	118 KTH	421,43	980.000.000	852.030.430	86,94	13,06	82,65	Sangat Efisien
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	4423 Ha	4423	165.000.000	164.581.009	99,75	0,25	50,63	Cukup Efisien
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kehutanan kepada stakeholder			100						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/berkembang									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3 Dok	150	150.000.000	148.159.547	98,77	1,23	53,07	Cukup Efisien

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Lap	20 Lap	100	200.000.000	198.969.911	99,48	0,52	51,29	Cukup Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	299 Orang	290 Orang	0,9698	41.424.385.500	39.518.066.314	95,40	4,60	61,50	Sangat Efisien
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dok	3 Dok	100	253.120.000	247.060.000	97,61	2,39	55,99	Cukup Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Lap	20 Lap	100	180.000.000	178.865.484	99,37	0,63	51,58	Cukup Efisien
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	100	100.000.000	99.746.064	99,75	0,25	50,63	Cukup Efisien

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	100	50.000.000	48.356.756	96,71	3,29	58,22	Cukup Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	100	198.000.000	198.000.000	100,00	0,00	50,00	Cukup Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	90.000.000	89.952.933	99,95	0,05	50,13	Cukup Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100	425.000.000	420.065.000	98,84	1,16	52,90	Cukup Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	86.000.000	85.224.900	99,10	0,90	52,25	Cukup Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	185.000.000	182.575.598	98,69	1,31	53,28	Cukup Efisien
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	100.000.000	94.633.632	94,63	5,37	63,42	

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6.000.000	5.940.000	99,00	1,00	52,50	Cukup Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100	160.000.000	159.315.000	99,57	0,43	51,07	Cukup Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	100	1.544.000.000	1.539.450.404	99,71	0,29	50,74	Cukup Efisien
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	70.000.000	69.264.000	98,95	1,05	52,63	Cukup Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	40.000.000	40.000.000	100,00	0,00	50,00	Cukup Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	22.000.000	16.357.505	74,35	25,65	114,12	Sangat Efisien

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	613.155.978	492.937.279	80,39	19,61	99,02	Sangat Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	3.731.753.000	3.704.753.000	99,28	0,72	51,81	Cukup Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	100	786.000.000	724.301.677	92,15	7,85	69,62	Sangat Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100	131.800.000	119.188.865	90,43	9,57	73,92	Sangat Efisien

D. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja setiap indikator kinerja utama yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa indikator kinerja utama yang mencapai target dan tidak mencapai target, hal ini disebabkan adanya program dan kegiatan yang tidak mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan dan ada juga program dan kegiatan yang mengalami beberapa kendala atau hambatan selama pelaksanaan sehingga menjadi penyebab kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1.	Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (ha)	12.350	21.593,22	174,84	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	300	Menunjang
		2.	Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	6.000.000	11.203.220,45	186,72	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
								PBPH Di Kawasan Hutan Produksi			
							Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Peningkatan Sarana Prasarana Jasa Lingkungan	100	Menun-jang	
		3.	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50.000.000.000	129.069.761.521	258,14	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
							Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalia, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	100	Menun-jang	
		4.	Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1	1	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
							Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	100	Menunjang
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	5.	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	389	-3772	-970	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
		6.	Penurunan luas kebakaran hutan (ha)	5985	-1547	-26	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	100	Menunjang
							PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	100	Menunjang
		7.	Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	3,00	7	233,33	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	97,80	Menunjang
		8.	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio)	0,44	0,465	105,68	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
							Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			
							Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Provinsi			
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,17	0,27	158,82	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
							Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	141,18	Menunjang
							Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	100	Menunjang
							PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
							Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
							Peningkatan Koordinasi dan	Lokasi Pembinaan	112,5	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Rehabilitas DAS		
		10.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) (%)	0,17	0,05	29,41	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	97,80	Menunjang
							PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100	Menunjang
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi	11.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan	5,00	83,33	1.666,60	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
							Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	produktif oleh masyarakat sekitar hutan		hutan melalui Perhutanan Sosial (%)				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	122,73	Menunjang
							Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	421,43	Menunjang
							Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4423,00	Menunjang
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kehutanan kepada stakeholder	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/berkembang		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150	Menunjang
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96,98	Menun-jang
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menun-jang
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	Menun-jang
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Menun-jang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	Menunjang
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Menunjang
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Menunjang
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang
							Administrasi Umum Perangkat Daerah			
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	Menunjang
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menun-jang
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menun-jang
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menun-jang
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Menun-jang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang

Seluruh program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai rata-rata 100% yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kelima program tersebut tidak menemui kendala teknis dalam pelaksanaannya selama tahun 2023.

Pada tahun 2023 terdapat sub kegiatan yang tidak terealisasi dengan maksimal dan atau sub kegiatan yang alokasi dananya kurang memadai namun sangat menunjang untuk pencapaian kinerja yaitu :

1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan. Kondisi kawasan hutan yang rusak masih tinggi (yang disebabkan pembukaan lahan hutan secara illegal)
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan kurang memadai untuk tanggung jawab kawasan hutan seluas 2,6 juta ha.
3. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan belum optimal untuk kegiatan pendampingan terhadap kelembagaan tani berjumlah kelompok binaan sebanyak 247 unit (211 kelompok perhutanan sosial dan 36 kelompok hutan rakyat). Sesuai anggaran yang tersedia, baru terakomodir sebanyak 118 unit (48,77%).

E. Data Dukung Pencapaian Kinerja

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1. Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBP serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBP serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan sebagai berikut :

1. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (Ha)

2. Produksi kayu sub sektor kehutanan (juta m3)
3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Milyar Rp)
4. Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)

Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBP serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	1.	Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam	12.350	21.593,22	174,84
		2.	Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)	6.000.000	11.203.220,45	186,72
		3.	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rp)	50.000.000.000	129.069.761.521	258,14
		4.	Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)	1	1	100,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Sasaran Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNBP serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan telah mencapai target indikator tahun 2023. Target produksi kayu sub sektor kehutanan, penerimaan sub sektor kehutanan, dan jumlah peta tematik yang KSP (tematik) telah berhasil dicapai melebihi target.

Pencapaian indikator pada sasaran ini didukung program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023 yaitu Program Pengelolaan Hutan, dengan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan pagu sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,31% dan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung,
 - 2.1 Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi pagu sebesar Rp. 102.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 96,5% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 2.2 Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi pagu sebesar

Rp. 145.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,11% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- 2.3 Sub kegiatan : Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH pagu sebesar Rp. 209.987.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 96,76% dan realisasi fisik sebesar 100%.

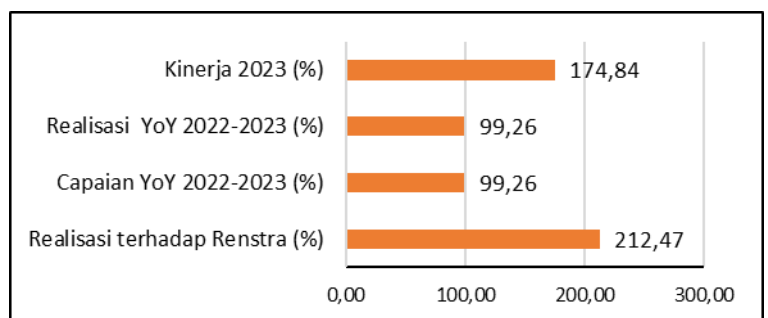
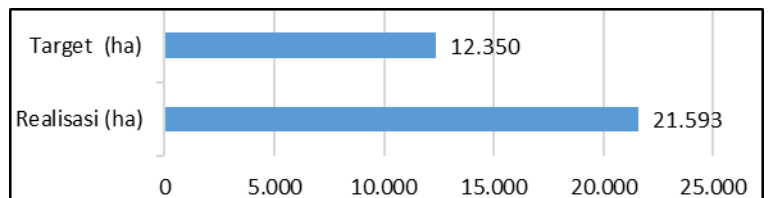
Total pagu untuk mendukung sasaran 1 sebesar Rp. 557.487.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 544.051.357,- atau 97,50%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (Ha)

Ikhtisar

Luasan Penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (Ha)

Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) – Indikator Kinerja OPD (Renstra)



Indikator luas penyelesaian permasalahan lahan merupakan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) sekaligus Indikator Kinerja OPD (Renstra). Capaian pada tahun 2023 sebesar 21.593 ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar 174,84%. Dibandingkan tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja hampir sama sebesar 99,26% dan 99,26 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra Tahun 2023 sebesar 170.410 Ha maka capaian kinerja telah melampaui target akhir atau sebesar 202,47 % atau dua kali target.

Data Dukung Capaian Luasan Penyelesaian Lahan

Kawasan hutan menjadi subyek penting yang menjadi sumber dasar konflik diantara para pemangku kepentingan, diantaranya antar instansi pemerintah, antar pemerintah pusat dan daerah, antar masyarakat dengan

pemerintah dan antar masyarakat dengan perusahaan peme Berdasarkan Instruksi Presiden agar kementerian terkait mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di Indonesia dan memberikan hak kepemilikan kepada petani kecil. Perubahan peruntukkan Kawasan hutan menjadi bukan Kawasan hutan adalah kewenangan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan hanya memberikan rekomendasi dan saran kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pola penyelesaiannya.

Berdasarkan Peta Indikatif Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA), luas kawasan hutan yang terindikatif terjadi tumpang tindih kepentingan seluas 123,528 ha, tersebar pada 13 kabupaten/kota dan hanya 11 Kabupaten /Kota yang telah mengusulkan penyelesaian. Hasil inventarisasi dan verifikasi pada lokasi-lokasi yang diusulkan, Gubernur Sumatera Selatan merekomendasikan seluas 143,047 ha. Tindak lanjut dari Program TORA telah selesai pada tahun 2021. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan yakni pemukiman dan areal terbangun pada kawasan hutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 maka program PPTKH dilanjutkan dengan program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Gubernur memiliki kewenangan mengusulkan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Pada tahun 2022 telah diidentifikasi permasalahan lahan di Kabupaten Muratara seluas 21.754 ha dan pada tahun 2023 identifikasi permasalahan kawasan hutan dilakukan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas seluas 21.593 ha. Rincian permasalahan kawasan hutan yang telah mendapat rekomendasi Gubernur dan telah dilakukan penyelesaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 19. Luas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hutan di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023

No	Kabupaten	Luas Indikatif (Ha)	Luas Permohonan (Ha)	Luas Invert (Ha)	Rekomendasi Penyelesaian Lahan oleh Gubernur /Usulan Pola Penyelesaian Lahan (Ha)					
					2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	OKU Timur	1.106	6.109	989	1.486					1.486
2	OKU Selatan	4.688	17.594	4.265	3.854					3.854
3	Musi Banyuasin	13.765	2.436	11.586	12.429				11.687	24.116
4	Musi Rawas	50.997	4.248	28.578	48.265				9.906	58.171
5	Muara Enim	9.906	16.865	9.128	9.046					9.046
6	Ogan Komering Ilir	19.925	48.758	19.731	19.767					19.767
7	Musi Rawas Utara	2.785						21.754		21.754
8	Banyuasin	8.312	9.138	13.515		13.483				13.483
9	OKU	5.932	16.649	5.746			13.167			13.167
10	PALI	4.062	6.827	1.039			5.363			5.363
11	Empat Lawang	1.072	12.715	5.555			12.647			12.647
12	Lahat	938	3.891				3.540			3.540
13	Prabumulih	40								-
	TOTAL	123.528	145.23	100.132	94.847	13.483	34.717	21.754	21.593	186.394

Sumber data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, 2023.



Gambar 6. Identifikasi permasalahan lahan dalam kawasan hutan pada PT Musi Banyuasin Indah

Faktor keberhasilan indikator ini adanya komitmen Gubernur Sumatera Selatan untuk menyelesaikan permasalahan lahan dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian permasalahan kawasan hutan pada tahun 2023, diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan kawasan yang bersinggungan dengan Perusahaan dan atau Masyarakat untuk dilakukan analisa dan rekomendasi pola penyelesaiannya, yaitu :

1. Identifikasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan dengan PT Musi Banyuasin Indah di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 3.293 ha.

2. Identifikasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan dengan PT Perkebunan Nusantara di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 8.394 ha.
3. Identifikasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan dengan Masyarakat di Desa Desa Lubuk Pandan Kabupaten Musi Rawas seluas 9.906 ha.

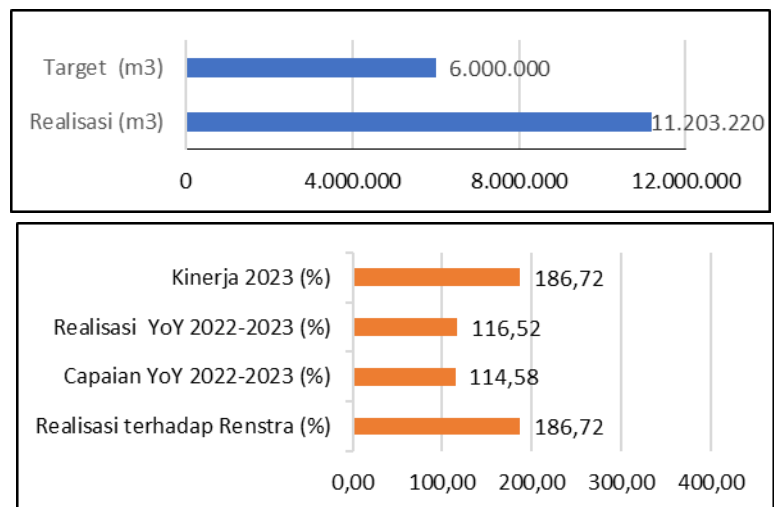
Sedangkan faktor penghambat bagi tercapainya luasan penyelesaian permasalahan kawasan hutan yaitu Tata cara/prosedur penyelesaian permasalahan lahan masyarakat dalam kawasan hutan belum dapat diterima masyarakat. Masyarakat masih beranggapan atas rumitnya prosedur yang ditetapkan KLHK. Kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kejelasan status lahannya.

2. Produksi kayu sub sektor kehutanan (juta m3)

Iktisar

Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) – Indikator Kinerja OPD (Renstra)

Produksi kayu sub sektor kehutanan (m3)



Realisasi produksi kayu sampai dengan bulan November tahun 2023 sebesar 186,72% dari target. Dibandingkan dengan capaian dan realisasi tahun 2022, kinerja Dinas Kehutanan meningkat masing-masing sebesar 116,52% dan 114,58%. Produksi kayu pada tahun ke 5, telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD maupun Renstra.

Data dukung Capaian Produksi kayu sub sektor kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan berupa perizinan berusaha pada hutan produksi yang telah berusaha di Sumatera Selatan, dilakukan dengan multiusaha kehutanan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan HHBK, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan HHBK.

Produksi hasil hutan berupa kayu di Wilayah Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 20. Produksi Hasil Hutan Kayu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	KABUPATEN	PRODUKSI PBPH (M3)	TEBANGAN NON HUTAN (M3)
1	Kab. Musi Banyuasin	2.349.047,71	4010,51
2	Kab. Ogan Komering Ulu	101.222,12	0
3	Kab. Muara Enim	845.066,98	1.121,62
4	Kab. Lahat	346.389,05	0
5	Kab. Musi Rawas	891.598,72	2.290,57
6	Kab. Ogan Komering Ilir	6.199.922,98	0
7	Kota Palembang	0	0
8	Kota Prabumulih	0	0
9	Kota Lubuk Linggau	0	0
10	Kota Pagaralam	0	0
11	Kab. Banyuasin	423.909,50	5.189,65
12	Kab. Oku Timur	6.821,61	0
13	Kab. Oku Selatan	2.200,43	0
14	Kab. Ogan Ilir	0	0
15	Kab. Empat Lawang	0	0
16	Kab. Penukal Abab Lmtg Ilir	20.194,26	0
17	Kab. Musi Rawas Utara	0	4.234,74
	JUMLAH	11.186.373,36	16.847,09

*) Sumber Data : SIPUHH dengan November 2023

Sedangkan produksi hasil hutan bukan kayu berupa getah, buah, madu, biji, daun diproduksi oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), sebagai berikut:

Tabel 21. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

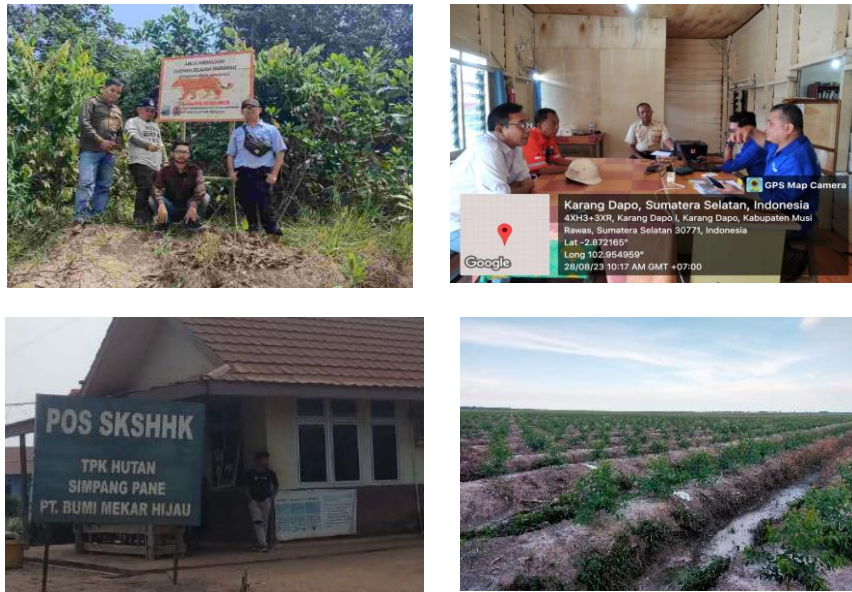
NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Kab. Musi Banyuasin	
	- Getah Karet Hutan (Ton)	609,133 Ton
	- Damar Batu (Ton)	2 Ton
	- Getah Jernang (Ton)	0,019 Ton
	- Madu (Liter)	73,53 Liter
	- Tandan Buah Sawit (Ton)	106 Ton
2	Kab. Ogan Komering Ulu	0
3	Kab. Muara Enim	0
4	Kab. Lahat	0
5	Kab. Musi Rawas	0
6	Kab. Ogan Komering Ilir	
	- Getah Karet Hutan (Ton)	409,4 Ton
	- Padi (Gabah) (Ton)	412 Ton
7	Kota Palembang	0
8	Kota Prabumulih	0
9	Kota Lubuk Linggau	0
10	Kota Pagaralam	
	- Cabai (Ton)	13 Ton
	- Kopi Robusta (Kg)	59190 Kg
	- Kubis (Kg)	445000 Kg
11	Kab. Banyuasin	
	- Buah-Buahan/Umby-Umbian Lainnya (Ton)	4 Ton
	- Jagung (Ton)	4 Ton
	- Padi (Gabah) (Ton)	14 Ton
	- Tandan Buah Sawit (Ton)	5 Ton
12	Kab. Oku Timur	0
13	Kab. Oku Selatan	0

NO	KABUPATEN	JUMLAH
14	Kab. Ogan Ilir	0
15	Kab. Empat Lawang	0
16	Kab. Penukal Abab Lmtg Ilir	0
17	Kab. Musi Rawas Utara	
	- Getah Karet Hutan (Ton)	41,574 Ton

*) Sumber Data : SIPUHH dengan November 2023

Peningkatan Pencapaian Produksi Kayu Sub Sektor Kehutanan tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemanfaatan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup optimal, faktor pendukung adanya peningkatan pencapaian tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap Rencana Kegiatan Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), namun realisasi pelaksanaan pembinaan pemanfaatan Kawasan Hutan sebanyak 12 (dua belas) PBPH yang berada di Kabupaten ; Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:
 - 1) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi berada di Kabupaten Musi Banyuasin
 - 2) PT. Bumi Andalas Permai berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 3) PT. BUmi Mekar Hijau berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 4) PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 5) PT. Ciptamas Bumi Subur berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 6) PT. Paramitra Mulya Langgeng berada di Kabupaten Musi Rawas Utara
 - 7) PT. Musi Hutan Persada berada di Kabupaten Muara Enim Kabupaten Pematang Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Rawas
 - 8) PT. Bumi Persada Permai II berada di Kabupaten Musi Banyuasin
 - 9) PT. Rimba Hutani Mas di Kabupaten Musi Banyuasin
 - 10) PT. Sumber Hijau Permai di Kabupaten Musi Banyuasin
 - 11) PT. Wahana Lestari Makmur Sukses di Kabupaten Musi Banyuasin
 - 12) PT. Kerawang Ekawana Nugraha di Kabupaten Ogan Komering Ilir



Gambar 7 Pembinaan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten OKU Timur, Muba dan OKI

Pembinaan terhadap PBPH diantaranya bertujuan :

- Mengendalikan kebakaran hutan yang signifikan pada kawasan PBPH, walaupun terjadi kebakaran hutan hanya dalam skala yang tidak luas dan lebih terkendali, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya telah mendorong pemegang izin untuk meningkatkan upaya pencegahan pengendalian kebakaran hutan daripada melakukan pemadaman.
- Dalam upaya penyelesaian masalah tenurial antara pemegang izin PBPH dengan masyarakat, antara lain telah dilakukan fasilitasi kemitraan kehutanan antara pemegang izin PBPH dengan masyarakat melalui program Kelola Sosial pada RKTPH PBPH.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), dalam rangka peningkatan produksi hutan alam.
- Pembinaan para Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GANIS CANHUT) dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme perencanaan hutan pada masing-masing PBPH, sehingga penyusunan

RKTPH dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan target yang diharapkan.

e. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) pada empat PPKH yaitu :

- 1) PT. Pertamina EP di Kabupaten Pali
- 2) PT. GWN-Pertamina EP di Kabupaten Muba
- 3) PT. PLN Persero di Kabupaten OKU Timur
- 4) PT. PMSS di Kabupaten Muara Enim



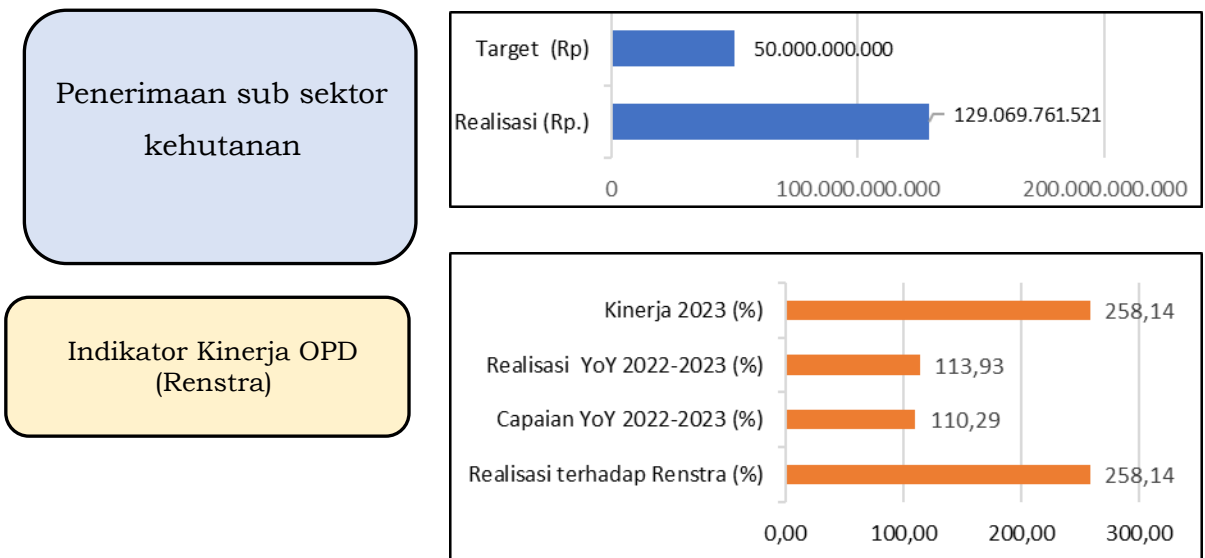
Gambar 8. Pembinaan dan Monitoring pada PT PLN di Kabupaten OKUT dan PT GWN di Kabupaten Muba

Faktor yang dapat menghambat capaian indikator kinerja ini yaitu:

- a. Konflik tenurial antara PBPH dengan Masyarakat dan perambahan hutan pada wilayah lindung PBPH yang masih terjadi di wilayah PBPH.
- b. Kebakaran Hutan dan Lahan yang masih berpeluang terjadi pada musim kemarau Panjang.
- c. Belum terealisasinya dengan baik pelaksanaan kegiatan multi usaha dibidang kehutanan pada masing-masing PBPH.

3. Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Milyar Rp)

Iktisar



Realisasi PNBP melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 258,14%, meningkat 110,29% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 113,93%. Target akhir Renstra telah dilampaui sebesar 2,5 kali lipatnya.

Data dukung Capaian Penerimaan sub sektor kehutanan

Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH SDA) Kehutanan merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH SDA Kehutanan terdiri atas IIUPH, PSDH, dan DR. IIUPH (Iuran Izin Pemanfaatan Hutan) merupakan pungutan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan suatu kawasan hutan tertentu. IIUPH ini dilakukan sekali pada saat izin diberikan. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) merupakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan. PSDH dipungut dari hutan Negara. DR (Dana Reboisasi) dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu. DR dipungut dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

Penerimaan Sub Sektor Kehutanan mengalami peningkatan, selain karena kepatuhan PBPH juga dipengaruhi oleh : (1) jumlah produksi kayu PBPH meningkat (2) adanya PNBP yang diperoleh dari pembayaran ganti rugi

tegakan akibat penggunaan hutan untuk tambang dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari pelepasan kawasan hutan. (3) adanya PNBPN yang diperoleh dari usaha Perhutanan Sosial. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan PSDH secara signifikan, karena adanya pengenaan denda bagi Perusahaan Perkebunan yang terlanjur menanam sawit di dalam kawasan hutan. Hal ini merupakan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

Realisasi PNBPN yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 94.164.456.523,- dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 34.903.966.258,- dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp. 1.338.780,- Berdasarkan wilayah kabupaten penghasilnya, Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 22. Penerimaan Negara Sub Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten	Penerimaan Negara (PNBP)			
		PSDH (Rp)	DR (USD)	DR (Rp)	IIUPH (Rp)
1	MUSI BANYUASIN	18.349.399.555	75.005	1.158.900.924	1.338.750
2	OGAN KOMERING ULU	840.455.358	341	5.152.324	
3	MUARA ENIM	8.457.211.835	174.273	2.674.355.820	
4	LAHAT	2.949.229.716	79.288	1.232.924.513	
5	MUSI RAWAS	7.506.759.401	11.458	180.714.269	
6	OGAN KOMERING ILIR	46.729.900.212	-	-	
7	KOTA PALEMBANG	-	-	-	
8	KOTA PRABUMULIH	-	-	-	
9	KOTA LUBUK LINGGAU	-	-	-	
10	KOTA PAGAR ALAM	7.300.020	-	-	
11	BANYUASIN	9.167.296.760	1.923.425	29.645.226.000	
12	OGAN KOMERING ULU TIMUR	40.507.320	-	-	
13	OGAN KOMERING ULU SELATAN	18.483.612	-	-	
14	OGAN ILIR	-	-	-	
15	EMPAT LAWANG	-	-	-	
16	PENUKAL ABAB LEMATANG	87.855.264	-	-	
17	MUSI RAWAS UTARA	10.057.460	436	6.692.408	
	JUMLAH s.d November 2023	94.164.456.513	2.264.225	34.903.966.258	1.338.750

Sumber data : Bidang PPH, 2023

UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mengatur persentase Dana Bagi Hasil SDA

Kehutanan untuk Provinsi yaitu IIUPH sebesar 32%, PSDH sebesar 16%, dan DR sebesar 40%, sehingga terjadi peningkatan penerimaan daerah untuk Sumatera Selatan dari sektor Kehutanan.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Adanya pelaksanaan rekonsiliasi administrasi pembayaran PSDH, DR dan IIUPH dengan wajib bayar atau pemegang izin pemanfaatan hutan sebanyak dengan KLHK sebanyak 4 kali.



Gambar 9 Kegiatan Rekonsiliasi administrasi pembayaran PSDH, DR dan IIUPH dengan KLHK

2. Sinkronisasi dan update data penerimaan negara kepada pemegang izin pemanfaatan hutan dan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penatausahaan hasil hutan pada PBPH dan PBPHH : CV Tanah Mas di Kabupaten Banyuasin, PT Tanjung Enim Lestari di Kabupaten Muara Enim, PT PT. OKI Pulp And Paper Mills di Kabupaten OKI, PT Sumatra Prima Fibreboard dan PT Wana Lestari Makmur di Kabupaten OI, PT SBA Wood Industries dan PT Bumi Mekar Hijau di Kabupaten OKI.
3. PNPB yang diperoleh dari Kelompok Perhutanan Sosial merupakan hasil nyata dari pembinaan terhadap usaha masyarakat di dalam kawasan hutan. Pada tahun 2023 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah membayar kewajibannya merupakan binaan dari UPTD KPH Wilayah V Lempuing sebanyak 21 KTH di Kabupaten OKI dan UPTD KPH Wilayah X Dempo sebanyak 4 KTH di Kabupaten Pagar Alam dan UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis.

Sedangkan faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini antara lain prosedur/tata cara pembayaran kewajiban perizinan sulit dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu di lapangan terutama bagi Kelompok

Usaha Perhutanan Sosial. Solusi yang dapat dilakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Wilayah V untuk memfasilitasi pelatihan tata cara pembayaran kewajiban kepada penyuluh sebagai pendamping Perhutanan Sosial.



Gambar 10. Monitoring dan Evaluasi penatausahaan hasil hutan pada CV Tanah Mas dan PT SBA Wood Industries

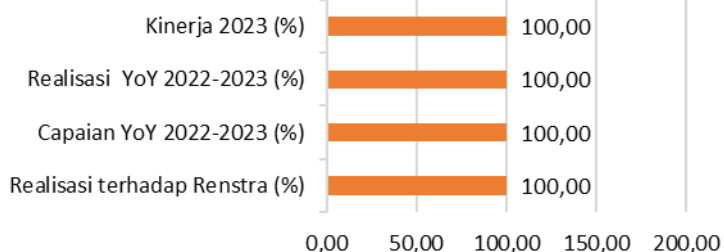
4. Jumlah peta tematik yang KSP (tematik)

Ikhtisar

Jumlah peta tematik
yang KSP



Indikator Kinerja OPD
(Renstra)



Peta tematik Kebijakan Satu Peta merupakan indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2021. Pada setiap tahunnya telah disusun peta tematik sehingga pada akhir tahun Renstra terdapat 3 peta. Capaian indikator peta tematik yang KSP pada tahun 2023 telah memenuhi target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Data dukung Capaian Jumlah peta tematik Kebijakan Satu Peta (tematik)

Permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik agraria merupakan sebagian permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pada

tahun 2016 Presiden menetapkan kebijakan Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Inisiatif Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) ini merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial. Peta tematik dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mencakup 7 (tujuh) tema, yaitu batas wilayah, *kehutanan*, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Dengan demikian penyusunan Peta Tematik Kebijakan Satu Peta (KSP) sektor kehutanan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang sering terjadi.

Penyusunan Peta Tematik Kehutanan merupakan indikator yang baru dimasukkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2021 dan ditargetkan dilakukan penyusunan setiap tahun. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun 1 (satu) tematik peta yaitu Peta Updating Data Penutupan Lahan Tahun 2022. Peta ini merupakan hasil pendetilan/pemutakhiran peta penafsiran penutupan lahan nasional dengan peta sebaran permukiman dalam kawasan, sebaran Lahan Baku Sawah dalam kawasan hutan dan sebaran kebun kelapa sawit terbangun dalam kawasan hutan pada tingkat Provinsi, sehingga diperoleh peta yang telah disesuaikan dengan perkembangan pembangunan untuk menjadi acuan kebijakan perencanaan wilayah kehutanan tingkat Provinsi seperti pemberian pertimbangan teknis terhadap rencana pembangunan.

Faktor keberhasilan indikator ini, selain adanya dukungan alokasi dana penyusunan Peta Tematik yaitu :

1. Koordinasi dan pengumpulan data pembangunan perkebunan pada OPD lain Provinsi Sumatera Selatan yang juga menangani perkebunan dan tanaman pangan yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

2. Koordinasi dan pengumpulan data pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
3. Pengumpulan data pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan dari UPTD KPH Wilayah I s/d XIV dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Koordinasi dengan UPT KLHK yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V
5. Penyusunan Data Statistik Kehutanan Tahun 2022 dari seluruh Bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPTD KPH Wilayah I s/d XIV dan UPT KLHK yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan faktor penghambat indikator ini yaitu kurangnya sumber daya peralatan pendukung pengolahan dan penyajian data spasial, namun dapat diatasi melalui penggunaan peralatan pendukung dari pihak lain UPT pusat dan atau NGO sebagai mitra pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

SASARAN 2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya

Kinerja pada sasaran 2 diselesaikan dengan Program Perlindungan Hutan dan KSDAE dan dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)
2. Penurunan luas kebakaran hutan (Ha)
3. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)
4. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (rasio)

Tabel 23. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
II	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	1. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)	389	-3,772	-969,67
		2. Penurunan luas kebakaran hutan (Ha)	5984,6	-1.546,79	-25,85
		3. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)	3	7	233,33
		4. Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan	0,44	0,465	105,68

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
		hutan (rasio)			

Sasaran Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya dapat diselesaikan telah mencapai target indikator tahun 2023. Target Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (rasio) dan jumlah kasus yang tertangani (kasus) telah mencapai target. Namun penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot) dan luas kebakaran hutan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Hutan

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

1.1.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pagu sebesar Rp. 1.990.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,72% dan realisasi fisik sebesar 100%.

1.2.Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan pagu sebesar Rp. 222.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,71% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

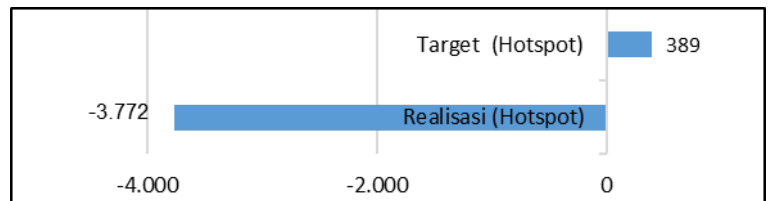
1.1 Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pagu sebesar Rp. 85.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 96,52% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Total pagu untuk mendukung sasaran 2 sebesar Rp. 3.108.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.053.348.765,- atau 98,23% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

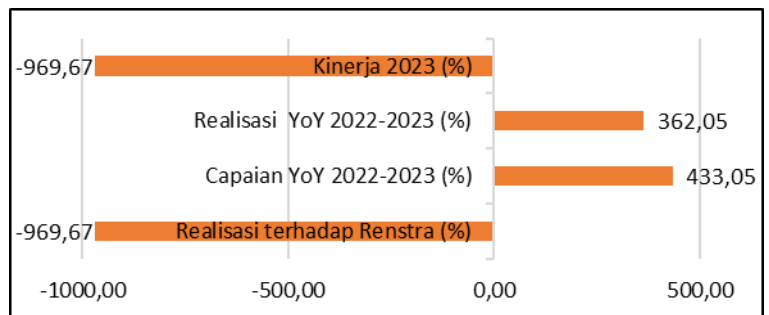
5. Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (hotspot)

Ikhtisar

**Penurunan
jumlah hotspot di
kawasan hutan**



Indikator Kinerja OPD
(Renstra)



Realisasi titik hotspot diperoleh dari hasil verifikasi titik hotspot dari sumber data satelit terra, aqua, SNPP, yang tersedia di website BRIN dengan tingkat kepercayaan di atas 50% dan dilakukan groundcheck lapangan. Pada tahun 2023 dengan target 389 titik api dan realisasi titik api sebanyak 4.161 titik dengan penurunan titik api dari tahun sebelumnya sebesar -3.722 titik atau hotspotnya naik 3.722 titik.

Dibandingkan realisasi tahun 2022, indikator penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan lebih tiga kali dari realisasi tahun 2022, hal ini menunjukkan kinerja penurunan hotspot lebih baik dari tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra 389 hotspot maka diperoleh capaian sebesar -969,67% atau bertambah 9 kali lipat dari target.

Penurunan hotspot tidak mencapai target karena pada tahun 2023 terjadi musim kemarau panjang akibat dari dampak perubahan iklim terjadinya fenomena El nino. Fenomena iklim El nino sangat berdampak terhadap tingkat kekeringan atau kemarau yang panjang sehingga memicu terjadinya tingginya jumlah Hotspot.

Data Dukung Capaian Penurunan Jumlah Hotspot di Kawasan Hutan

Penurunan jumlah hotspot dalam kawasan hutan menentukan deteksi dini terhadap kebakaran hutan ataupun kerusakan hutan. Berdasarkan perhitungan akhir, jumlah hotspot di kawasan hutan untuk seluruh tingkat

kepercayaan sebagaimana tabel berikut. Dari data tersebut, terlihat hanya sepertiga dari jumlah hotspot yang dapat dilakukan pengecekan dan verifikasi lapangan baik melalui darat maupun dari udara. Hal ini menunjukkan lebih dari 60 % lokasi hotspot belum dilakukan pengendalian.

Tabel 24. Penurunan Jumlah Hotspot Tahun 2022 -2023

Wilayah KPH/ Kabupaten /Kota		Hotspot 2022	Hotspot 2023	Penurunan Hotspot
UPTD KPH Wil 1 Meranti		218	872	654
	Musi Banyuasin	200	872	672
	Musi Rawas Utara	18	0	-18
UPTD KPH Wil 2 Lalan Mendis		64	503	439
	Banyuasin	6	0	-6
	Musi Banyuasin	58	503	445
UPTD KPH Wil 3 Banyuasin		108	1827	1719
	Banyuasin	106	57	-49
	Palembang	2	1770	1768
UPTD KPH Wil 4 Sungai Lumpur		62	4839	4777
	Ogan Komering Ilir	62	4839	4777
UPTD KPH Wil 5 Mesuji		82	5358	5276
	Ogan Komering Ilir	82	5358	5276
UPTD KPH Wil 6 Bukit Nanti - Martapura		137	1200	1063
	Ogan Komering Ulu	101	427	326
	Ogan Komering Ulu Timur	36	773	737
UPTD KPH Wil 7 Mekakau Saka		160	492	332
	Ogan Komering Ulu Selatan	160	492	332
UPTD KPH Wil 8 Semendo		40	38	-2
	Lahat	2	8	6
	Muara Enim	38	30	-8
UPTD KPH Wil 9 Suban Jeriji		292	926	634
	Lahat	43	326	283
	Muara Enim	110	458	348
	Ogan Ilir	34	0	-34
	Ogan Komering Ulu	10	69	59

Wilayah KPH/ Kabupaten /Kota		Hotspot 2022	Hotspot 2023	Penurunan Hotspot
	Prabumulih	95	73	-22
UPTD KPH Wil 10 Dempo		5	10	5
	Pagar Alam	5	10	5
UPTD KPH Wil 11 Kikim Pasemah		145	326	181
	Empat Lawang	83	207	124
	Lahat	62	119	57
UPTD KPH Wil 12 Benakat		533	2099	1566
	Lahat	12	150	138
	Muara Enim	33	439	406
	Musi Banyuasin	84	29	-55
	Musi Rawas	167	242	75
	Ogan Ilir	4	927	923
	Penukal Abab Lematang Ilir	233	312	79
UPTD KPH Wil 13 Lakitan Bukit Cogong		298	909	611
	Lubuklinggau	15	23	8
	Musi Rawas	226	544	318
	Musi Rawas Utara	57	342	285
UPTD KPH Wil 14 Rawas		236	607	371
	Musi Rawas Utara	236	607	371
No data			26	26
Total Hotspot		2.380	20.032	17.652

Sumberdata : Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, 2023

Upaya mendukung indikator kinerja Penurunan jumlah hotspot dalam kawasan hutan didukung antara lain :

- 1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan sebanyak 77 Orang, yang ditempatkan pada tingkat tapak atau pada 14 (empat belas) UPTD KPH. Sebagian besar direkrut dari warga disekitar kawasan hutan. Tugas PTT Dalkar dan Pamhut diantaranya melakukan patroli pengamanan hutan dan patroli pengendalian kebakaran hutan di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV.
- 2) Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan Tingkat Tapak.

Dalam upaya mencapai sasaran penurunan jumlah titik hotspot di kawasan hutan, UPTD KPH Wilayah I – XIV melakukan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan Tingkat Tapak ke wilayah kawasan hutan yang rawan kebakaran atau yang terdeteksi hotspot. Patroli dalkar sekaligus sosialisasi dilakukan petugas kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.

- 3) Pada kawasan yang rawan kebakaran hutan juga dilakukan sosialisasi pembentukan Masyarakat Peduli Api pada level Desa diharapkan pengendalian kebakaran dan lahan menjadi lebih cepat dan sistematis.
- 4) Pemantauan hotspot melalui Sistem Informasi Songket, penyebaran informasi melalui media sosial (WA dan Email).

Tabel Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan

No.	Nama KPH		Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan	
1	UPTD KPH Wilayah I	Meranti	18	Lokasi
2	UPTD KPH Wilayah II	Lalan Mendis	22	Lokasi
3	UPTD KPH Wilayah III	Palembang-Banyuasin	No data	Lokasi
4	UPTD KPH Wilayah IV	Sungai Lumpur	16	Lokasi
5	UPTD KPH Wilayah V	Lempuing-Mesuji	No	Lokasi
6	UPTD KPH Wilayah VI	Bukit Nanti Martapura	27	Lokasi
7	UPTD KPH Wilayah VII	Mekakau Saka	25	Lokasi
8	UPTD KPH Wilayah VIII	Semendo	53	Lokasi
9	UPTD KPH Wilayah IX	Suban Jeriji	No Data	Lokasi
10	UPTD KPH Wilayah X	Dempo	14	Lokasi
11	UPTD KPH Wilayah XI	Kikim Pasemah	23	Lokasi
12	UPTD KPH Wilayah XII	Benakat	21	Lokasi
13	UPTD KPH Wilayah XIII	Lakitan Bukit Cogong	34	Lokasi
14	UPTD KPH Wilayah XIV	Rawas	27	Lokasi

Sumberdata : Laporan Tahunan UPTD KPH, 2023



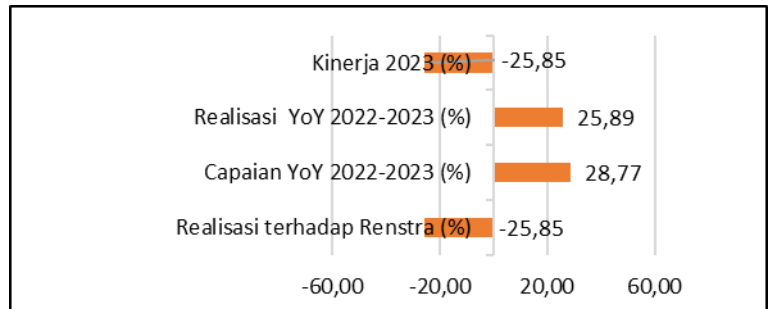
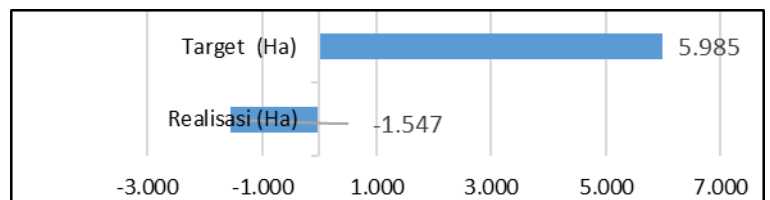
Gambar 11 Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di HP Pedamaran Kabupaten OKU dan Kegiatan Evaluasi pengendalian kebakaran hutan di UPTD KPH Wilayah X Dempo

6. Penurunan luas kebakaran hutan (Ha)

Ikhtisar

**Penurunan luas
kebakaran
hutan**

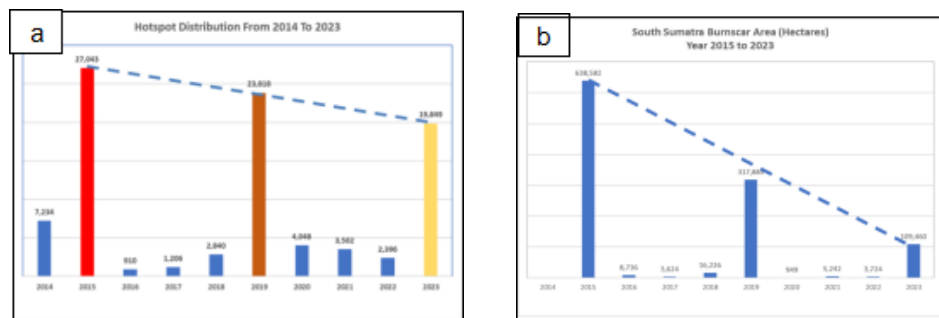
Indikator Kinerja
Daerah (RPJMD) -
Indikator Kinerja OPD



Realisasi kebakaran hutan pada tahun 2023 sebesar 7.351 ha diperoleh dari laporan pemadaman kebakaran via darat dan atau melalui water bombing pada kawasan hutan. Pada tahun 2023 dengan target penurunan kebakaran hutan seluas 5985 ha dan realisasi 7.351 ha sehingga penurunannya -1.547 ha, capaian indikator penurunan luas kebakaran hutan sebesar -25,85%. Target penurunan luas kebakaran hutan tidak tercapai. Upaya menurunkan kebakaran hutan merupakan dari usaha berbagai pihak yang ikut berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan baik dari pemerintah pusat, daerah dan asyarakat, namun kondisi alam sangat mempengaruhi terjadinya kebakaran

hebat. Penurunan luas kebakaran tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra hanya sebesar -25,85 % dari penurunan luas kebakaran hutan yang diperkirakan/ditargetkan pada tahun 2023.

Penurunan hotspot dan luas kebakaran tidak mencapai target karena pada tahun 2023 terjadi musim kemarau panjang akibat dari dampak perubahan iklim terjadinya fenomena El nino. Tahun 2023 merupakan tahun dengan fenomena iklim El nino, yang sangat berdampak terhadap tingkat kekeringan atau kemarau yang panjang sehingga memicu terjadinya tingginya jumlah Hotspot dan tingginya luas areal terbakar, kejadian ini pernah dialami oleh provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 dan 2019. Berdasarkan data dari kementerian KLHK pada tahun 2015, 2019 dan 2023, terlihat pada gambar berikut:



Gambar 12(a) sebaran hotspot tahun 2014 sampai 2023, dan (b) luas areal terbakar di Sumatera Selatan tahun 2015-2023

Dari data sebaran hotspot pertahun tersebut, terlihat tingginya jumlah hotspot ditahun terjadi fenomena El Nino di Sumatera Selatan, namun terlihat bahwa ditahun 2023 terlihat penurunan jumlah hotspot yang signifikan dari tahun 2015 dan 2019, hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik dan efektif. Sebaran luas areal terbakar pertahun tersebut menunjukkan tingginya jumlah areal terbakar ditahun terjadi fenomena El Nino di Sumatera Selatan, namun terlihat bahwa ditahun 2023 terjadi penurunan luas kebakaran hutan dan lahan yang signifikan dari tahun 2015 dan 2019, hal ini menunjukkan bahwa upaya Penanggulangan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik dan efektif.

Data Dukung Capaian Penurunan luas kebakaran hutan

Penurunan luas kebakaran dalam kawasan hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang sangat dominan di Sumatera Selatan. Perhitungan Luas kebakaran hutan yang dilakukan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melalui proses *delineasi* dari data sebaran hotspot yang terjadi Sumatera Selatan dan *dioverlaykan* dengan citra satelit Landsat-8 & Sentinel 2A&B. Sumber data bekas terbakar : WEB BRIN. Perhitungan dan pengolahan data akhir tahun, luas kebakaran hutan di Sumatera Selatan sebagai mana pada tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan Sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi tidak dilaporkan dan belum dapat ditangani.

Tabel 25. Penurunan Luas Kawasan Hutan yang terbakar tahun 2022 dan 2023

Fungsi Kawasan Hutan	Luas Bekas Terbakar (Ha)		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Penurunan Luas
Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi	132	54.420	- 54.288
Hutan Lindung	5	1.705	- 1.700
Hutan Produksi	112	43.737	- 43.625
Hutan Produksi Konversi	16	7.263	- 7.247
Hutan Produksi Terbatas		1.715	- 1.715

Sumber Data : Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, 2023



Gambar 13. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Pengecekan Hotspot.

Sasaran penurunan luas kawasan hutan yang terbakar berhubungan dengan sasaran penurunan jumlah hotspot. Semakin intensif patroli dalkar dilakukan akan semakin besar peluang kebakaran hutan dapat dicegah. Selain pemantauan hotspot sebagai upaya deteksi dini terhadap kebakaran hutan, upaya pengendalian kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan evaluasi, pembinaan, koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan penanganan pasca kebakaran hutan. Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Tahun 2023.

Output: Masyarakat semakin mengerti apa itu karhutla, penyebab dan dampak karhutla, upaya-upaya pencegahan dan dapat menyampaikan hasil sosialisasi terhadap masyarakat lainnya.

2. Pemadaman dan Patroli pengendalian karhutlah secara mandiri oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten OKI, OI, Banyuasin.

Output: Tersedianya informasi dan data mengenai situasi dan kondisi lahan terbaru terkait rawan karhutla, Melakukan pemadaman sejak dini, Menyampaikan pesan larangan membakar lahan, dan Koordinasi tingkat tapak



Gambar 14 Pemadaman kebakaran Hutan
di HP Pedamaran OKI

3. Evaluasi Kepatuhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 14 Perusahaan PBPH/HTI sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
Output: Mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka pengendalian Karhutla, organisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska karhutla
4. Evaluasi Kepatuhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 2 Perusahaan IPPKH Migas, Minerba dan Non tambang sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
Output: Mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka pengendalian Karhutla, organisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska karhutla
5. Kegiatan dalam Rangka Pengecekan Hotspot di 2 Lokasi Titik Hotspot di Seluruh Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
Output: Menverifikasi dan klarifikasi data hotspot dari sistem informasi karhutla, Penanganan dini pemadaman api jika terjadi fire spot
6. Kegiatan Dalam Rangka Pengukuran Areal Bekas Terbakar Kebakaran Hutan dan Lahan di 3 lokasi terindikasi bekas terbakar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Output: memperoleh data luas kebakaran untuk kegiatan penanganan paska karhutla, penilaian kerugian, reboisasi dan penegakan hukum
7. Cetak Buku Statistik Hotspot Tahun 2022.
Output: Diperolehnya informasi dan data Sebaran jumlah Hotspot perkabupaten, perjenis kawasan, perjenis tanah, perpemegang ijin
8. Pengadaan Personal Use untuk Tim penanggulangan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Sekitarnya.
Output: Terpenuhinya Perlengkapan pribadi brigdalkarhutla dalam operasi penaggulangan karhutla
9. Pengadaan Motor Roda 3 (2 unit) dan pompa air portable dan kelengkapannya (3Perangkat) untuk diserahkan ke Masyarakat (Kelompok Masyarakat Peduli Api).
Output: Terpenuhinya sapras karhutla didaerah rawan karhutla

10. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi penanggulangan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan dengan 14 UPTD KPH tahun 2023
Output: Evaluasi kegiatan yang sdh dilakukan oleh 14 UPTD KPH, bridalkarhutla, SDM, sapras, hambatan dan rencana tindak lanjut
11. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekitarnya.
Output: Melakukan pemadaman karhutla secara tepat dan efektif
12. Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Output: Koordinasi dan sinkronisasi data sebaran hotspot dan areal terbakar , kegiatan yang sdh dilaksanakan dan rencana kegiatan selanjutnta dengan BRIN, KLHK, BNPB

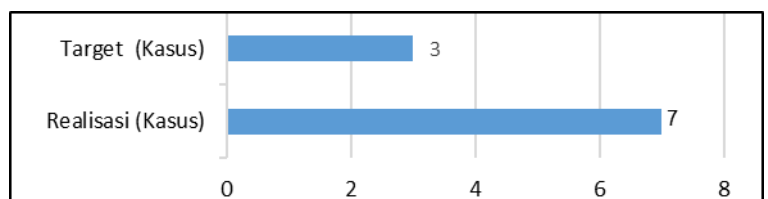


Gambar 15 Perlindungan dan Pengamanan Hutan di HP Lalan Kabupaten Muba

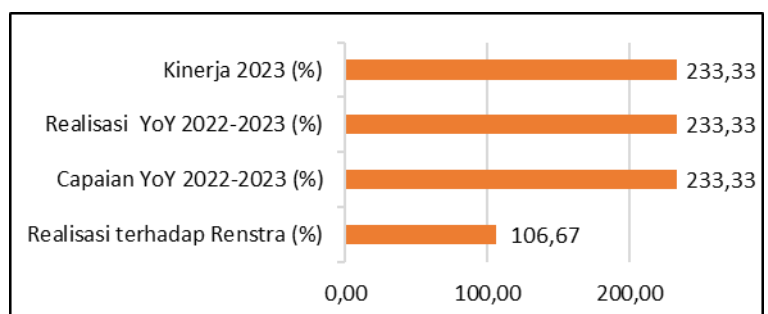
7. Jumlah kasus yang tertangani (kasus)

Ikhtisar

**Jumlah kasus
yang tertangani**



**Indikator Kinerja OPD
(Renstra)**



Pada tahun 2023 dengan target 3 kasus dan realisasi 7 kasus, capaian indikator jumlah kasus yang tertangani sebesar 233%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 4 kasus. Dalam masa periode renstra, jumlah kasus yang tertangani sampai dengan tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 106,67 %.

Data Dukung Capaian Jumlah kasus yang tertangani

Kasus-kasus gangguan terhadap kawasan hutan ditangani secara preventif, preemtif dan represif. Penanganan kasus yang ditangani melalui jalur hukum termasuk kegiatan represif. Kasus pelanggaran hukum kehutanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan diproses melalui jalur hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 26. Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Kehutanan Tahun 2023

No.	Kawasan Hutan	Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Kasus	Keterangan
1.	HP Lalan	Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin	40	Perambahan hutan	1. Telah diamankan Alat Berat Excavator jenis Komatsu Pc-100 dan 1 (Satu) buah <i>controler</i> dari kawasan Hutan Produksi Lalan, Bayung Lencir, Kecamatan Musi Bayuasin. 2. Proses pendalaman, sesuai arahan dari GAKKUM surat No. S.156/BPPHLHK.3/Gkm/2.015/2023 dikarenakan tidak cukup bukti, maka alat berat dititip rawat sementara kepada pemilik.
2.	HL Air Saleh	Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin	46	Perambahan hutan	1. Pengumpulan Bahan dan Keterangan di areal Hutan Lindung Muara Saleh; 2. Adanya okupasi lahan dan telah diberikan Sosialisasi berupa pemahaman kepada Sdr. Supriyono, bahwa taman rekreasi seluas ± 6 Ha tersebut masuk ke dalam areal Hutan Lindung Muara Saleh; 3. Adanya okupasi lahan oleh Sdr. H. Baharuddin berupa tambak udang, tambak ikan, dan rumah sarang burung

No.	Kawasan Hutan	Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Kasus	Keterangan
					walet seluas ± 40 Ha pada areal Hutan Lindung Muara Saleh; 4. Telah dilakukan pemanggilan guna klarifikasi kepada terduga pelaku Sdr. Supriyono dan Sdr. H. Baharuddin, tetapi tidak hadir hingga pemanggilan ke-2.
3.	HP Meranti Muba	PT. Sentosa Bahagia Bersama, Kabupaten Musi Banyuasin	75	Perambahan hutan	1. Penyerahan 16 item Barang Bukti, termasuk berat Bulldozer Merk Caterpillar Model D6D dengan No. Mesin 3306 No. Seri 10Z28681 dan Tersangka A.n. Dedi Mulyadi bin Mursadi Alias Jales ke Kejaksaan Negeri Sekayu Kab. Musi Banyuasin. P.21 2. Dalam proses sidang perdana 3. Sudah Inkrah Keputusan Pengadilan
4.	HP Lalan	Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin	48	Perambahan hutan	1. Pengumpulan Bahan dan Keterangan dengan upaya pemeriksaan terhadap petugas UPTD Wil. II Lalan Mendis; BAP Klarifikasi terhadap Kades Kepayang; dan klarifikasi ke kantor Polsek Bayung Lencir; 2. Berdasarkan laporan Pulbaket, proses hukum dan penahanan serta pembebasan keempat terduga tersangka dilakukan oleh Polsek Bayung Lencir; 3. Merekomendasikan Pimpinan MJP Partner Advocates and Legal Consultants untuk berkoordinasi langsung dengan Polsek Bayung Lencir.
5.	HL Muara Saleh	Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin	5	Perambahan hutan	1. Pelimpahan kasus dari UPTD KPH Wilayah III, Palembang-Banyuasin Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel 2. Pemanggilan saksi-saksi 3. Gelar Perkara peningkatan Lidik menjadi Sidik. Hasil gelar perkara belum layak naik sidik 4. Telah diberikan saran, agar dikembalikan ke UPTD terkait kelengkapan berkas perkara

No.	Kawasan Hutan	Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Kasus	Keterangan
6.	HL Muara Saleh	Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin	30	Perambahan hutan	1. Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) di Kawasan Hutan Lindung, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. 2. Pemanggilan saksi-saksi
7.	HP Lalan	Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin	10	Perambahan hutan	1. Pegumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) 2. BAP Saksi

Sumber data : Bidang Linhut KSDAE, 2023



Gambar 16. Sosialisasi dan Penegakan Pengamanan Hutan oleh Polisi Kehutanan

Faktor keberhasilan capaian indikator ini diantaranya : Jumlah dan kecakapan personil Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kerjasama dan kolaborasi dengan KLHK khususnya Balai Penegakan Hukum Seksi Wilayah Sumatera Selatan dan Pihak Kepolisian dalam penanganan kasus yang terjadi, serta pendanaan yang memadai. Selain itu, untuk menunjang kesiapan personil pada tahun 2023 diselenggarakan pelatihan kecakapan menembak untuk personil yang memiliki tupoksi perlindungan hutan. Pelatihan ini bekerjasama dengan Perbakin Provinsi Sumatera Selatan.

Aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja yaitu :

1. Patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan atas LK Nomor: LK/01/POLHUT/IV/2023 tanggal 10 April 2023 di areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Sentosa Bahagia Bersama, Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan dalam rangka Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Penyerahan Penanganan Laporan Pengaduan Sesuai Surat Kajari Banyuasin No. B-574/L.6.19/02/2023 di areal UPTD KPH Wilayah III Palembang – Banyuasin
4. Patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan dalam rangka Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas laporan Pimpinan MJP Partner Advocates and Legal Consultants Nomor: 213/MT/MTL/MJP/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis
5. Patroli pengamanan hutan kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan pada Areal Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Swakelola Kelompok Tani Hutan Sinar Napalan Jaya Kisau Kecamatan Muaradua, UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka, Kabupaten OKU Selatan
6. Patroli pengamanan hutan pada areal lokasi kegiatan Kawasan hutan lindung dan hutan produksi saka UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka, Kabupaten OKU Selatan
7. Menghadiri Kongres Nasional Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) Pusat ke IV di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
8. Kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan dalam rangka patroli pengamanan hutan dan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) aduan Lembaga Bantuan Hukum Samudera AHKAM Sriwijaya di UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin, Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin
9. Olah tempat kejadian perkara sehubungan laporan kejadian Nomor: LK/01/POLHUT/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dan surat perintah penyidikan Nomor: SP.DIK/01/DISHUT/PPNS/V/2023 tanggal 10 Mei 2023
10. Patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan dalam rangka pengamanan barang bukti alat berat jenis bulldozer merk caterpillar warna kuning temuan perambahan Kawasan hutan di areal PBPH PT. Sentosa Bahagia Bersama Kabupaten Musi Banyuasin

11. Kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) perkara perambahan Kawasan Hutan Lindung Muara Saleh, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin
12. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam rangka pengawalan barang bukti alat berat jenis Bulldozer merek caterpillar warna kuning ke Kejaksaan Negeri Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
13. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam rangka penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (Penyerahan tahap II) di Kejaksaan Negeri Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
14. Kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam rangka patroli pengamanan hutan di wilayah UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin
15. Kegiatan patroli pencegahan dan pemberantasan kerusakan Kawasan hutan di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Kabupaten Musi Banyuasin
16. Rapat koordinasi GAKKUM LHK Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jakarta
17. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam rangka patroli pengamanan hutan di wilayah UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim

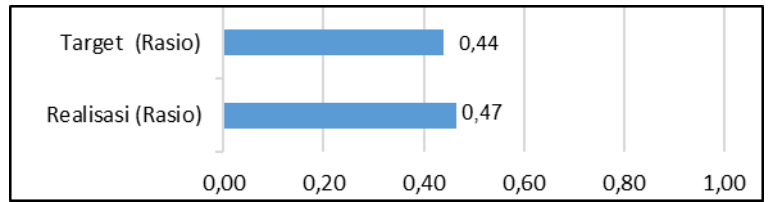


Gambar 17. Latihan menembak bagi Polisi Kehutanan dan Pejabat yang memiliki tupoksi perlindungan hutan

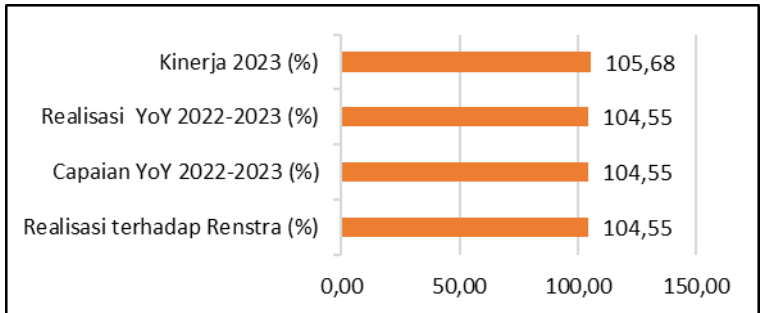
8. Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan (rasio)

Ikhtisar

Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan



Indikator Kinerja Nasional - Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) – Indikator Kinerja OPD (Renstra)



Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan merupakan indikator kinerja Nasional, indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan juga sekaligus menjadi indikator utama kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,47, yang diperoleh dari luas kawasan lindung seluas 1.574.092,00 Ha dibagi total luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan seluas 3.397.367 Ha.

Capaian tahun 2023 atas indikator rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan berdasarkan target 0,44 dan realisasi 0,46 adalah sebesar 105,68%. Dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2022 terjadi peningkatan masing-masing sebesar 104,55%. Target tahun akhir Renstra di capaian sebesar 104,55%.

Data Dukung Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati sangat penting dipertahankan. Ekosistem yang kompleks yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik termasuk di dalamnya ada tumbuhan dan hewan menjadi tidak seimbang lagi. Komponen ekosistem menjadi hilang dan tidak lestari dan bencana alam terjadi di dimana-mana. Untuk itu sangat penting melestarikan keanekaragaman hayati dan menyelaraskan pembangunan dengan prinsip berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri, hutan sebagai habitat satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi saat ini terdesak oleh perkembangan pemukiman dan perluasan lahan usaha

masyarakat. Pada jangka pendek akan muncul konflik antara manusia dan satwa liar ataupun eksploitasi tumbuhan yang dilindungi. Kebijakan konservasi sumberdaya hutan dan ekosistemnya dalam mempertahankan keanekaragaman hayati diantaranya melalui mempertahankan komponen ekosistem termasuk manusia dapat hidup selaras/berdampingan.

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam, dan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar setiap daerah berupaya menambah kawasan lindung secara mandiri pada zona-zona yang memenuhi kriteria untuk dipertimbangkan agar ditetapkan sebagai Kawasan lindung oleh pemerintah daerah baik di wilayah-wilayah penyangga seperti Areal Penggunaan Lain (APL) yang berbatasan dengan Kawasan konservasi yang merupakan jalan/koridor satwa yang dilindungi, areal izin pemanfaatan hutan, wilayah disekitar lokasi gambut maupun wilayah potensi penyangga lainnya.



Gambar 18. Sosialisasi dan koordinasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

Sampai dengan tahun 2023, Keanekaragaman hayati yang dipertahankan kelestariannya pada hutan dengan status sebagai berikut :

Tabel 27. Luas Hutan yang Berfungsi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Kawasan Hutan Fungsi Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas (ha)
Hutan Lindung	566.791,55
Hight Conservation Value pada PBPH	132.884,10
PBPH Restorasi Ekosistem	60.435,00
PBPH Penyerapan dan Penyimpanan Karbon	45.780,00
Hutan Konservasi	768.202,06
Jumlah	1.574.092,71

Sumber data : Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, 2023

Kawasan Hutan Fungsi Perlindungan Keanekaragaman Hayati tahun 2023 seluas 1.574.092,71 ha, pencapaian sasaran kinerja didukung oleh program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023. Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, melalui sosialisasi mitigasi konflik satwa liar dan manusia di :

1. Melaksanakan koordinasi para pihak terkait persiapan pelaksanaan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Wilayah kerja UPTD KPH Wil.X Dempo Kota Pagar Alam
2. Melaksanakan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Kota Pagar Alam
3. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan konflik manusia dan gajah sumatera di Kabupaten OKI
4. Melaksanakan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Wilayah kerja UPTD KPH Wilayah I Meranti
5. Melaksanakan koordinasi konflik manusia dan satwa liar di Wilayah kerja UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab. OKUS
6. Melaksanakan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Kabupaten OKI
7. Melaksanakan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Kabupaten OKI
8. Melaksanakan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Kota Prabumulih
9. Melaksanakan koordinasi terkait konflik manusia dan satwa liar di Kab. Musi Banyuasin.

Faktor penghambat capaian indikator ini diantaranya : Masih tingginya kebutuhan lahan kawasan hutan khususnya kawasan esensial yang menjadi habitat satwa liar dan tanaman langka dikonversi menjadi non hutan. Berkurangnya habitat satwa akan menimbulkan konflik atau mengganggu kehidupan manusia terutama di daerah penyanggah kawasan esensial. Sedangkan berkurangnya kawasan esensial menimbulkan punahnya tanaman dan satwa liar sehingga keseimbangan ekosistem menjadi terganggu dan berpengaruh terhadap kualitas penghidupan manusia.

SASARAN 3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan

Program Pengelolaan DAS dan RHL memiliki Sasaran Rencana Strategis 2018-2023 yaitu Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan. Kinerja pada sasaran 3 dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)

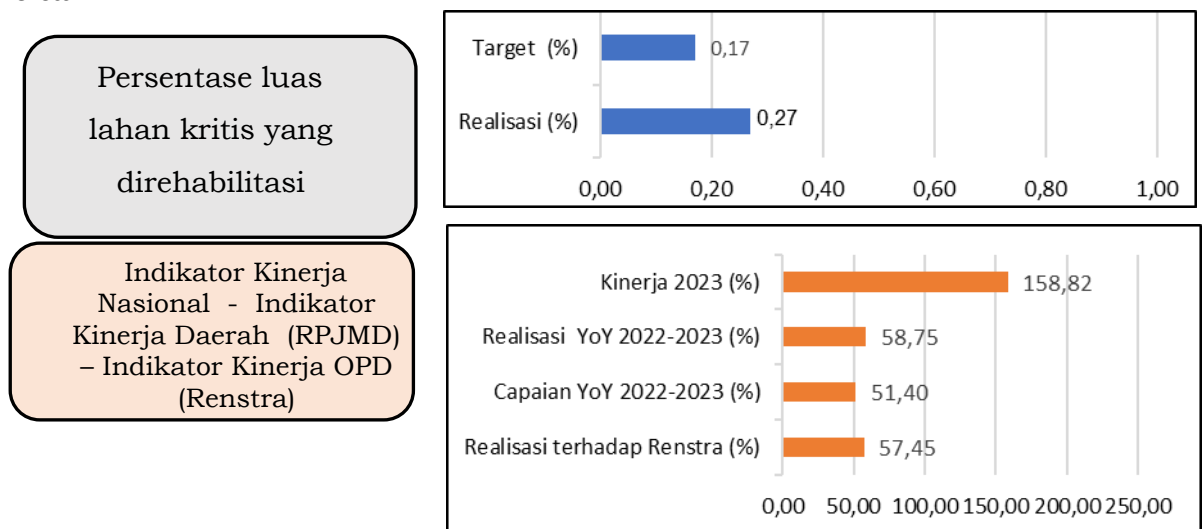
Tabel 28. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	9. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,17	0,27	158,82
		10. Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi) (%)	0,17	0,05	29,41

Total pagu untuk mendukung sasaran 3 sebesar Rp. 895.000.000,- dengan realisasi 99,52% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

9. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)

Ikhtisar



Luas lahan kritis yang direhabilitasi merupakan indikator kinerja Nasional dan sekaligus menjadi indikator utama kinerja Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020, indikator ini baru tahun 2021 ditetapkan menjadi indikator kinerja daerah sebagaimana dimuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Tahun 2023 indikator ini terealisasi sebesar 0,27%, yang diperoleh dari luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan yang direhabilitasi seluas 2.676 Ha dibagi dengan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan seluas 707.169 Ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,17% sehingga capaiannya sebesar 158,82%. Terhadap realisasi tahun 2022, indikator ini menurun atau sebesar 58,75 % dan capaian tahun 2021 juga menurun atau sebesar 51,40 %. Terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 0,17% maka diperoleh capaian sebesar 57,45%.

Pencapaian sasaran kinerja tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah :

1. Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :
 - a. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara pagu Rp. 640.000.000,- dengan realisasi keuangan 99,57% dan realisasi fisik 100%.
 - b. Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan pagu sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,31 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 95,73% dan realisasi fisik 100%.

Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi

Sejalan dengan perkembangan waktu tekanan terhadap kawasan hutan semakin tinggi yang antara lain disebabkan oleh gangguan penebangan liar (Illegal Logging), perambahan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan. Selain itu dampak dari pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah dan air yang baik menyebabkan masih banyaknya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis Lahan Kritis Provinsi Sumatera

Selatan atas dasar Keputusan Dirjen PDASRH No: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, bahwa lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 seluas 707.169 Ha.

Tabel 29. Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis (Ha)				Jumlah (Ha)
		Kritis		Sangat Kritis		
		Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	
1	Banyuasin	9.974	22	0	0	9.996
2	Empat Lawang	11.903	17.839	37.385	19.068	86.195
3	Kota Lubuk Linggau	5.022	1.960	1.079	125	8.186
4	Kota Pagar Alam	1.358	1.342	5.590	7.487	15.777
5	Kota Palembang	0	0	0	0	0
6	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0
7	Lahat	31.875	16.761	20.929	17.795	87.360
8	Muara Enim	16.858	21.459	19.991	9.478	67.786
9	Musi Banyuasin	100.749	3.932	0	0	104.681
10	Musi Rawas	32.729	5.377	3.812	412	42.330
11	Musi Rawas Utara	18.761	6.068	1.645	251	26.725
12	Ogan Ilir	0	0	0	0	0
13	Ogan Komering Ilir	8.905	833	0	0	9.738
14	Ogan Komering Ulu	31.067	16.930	7.328	340	55.665
15	Ogan Komering Ulu Selatan	66.124	71.936	31.307	13.455	182.822
16	Ogan Komering Ulu Timur	2.509	1.801	613	0	4.924
17	Penukal Abab Lematang Ilir	4.984	0	0	0	4.984
JUMLAH TOTAL		342.817	166.262	129.680	68.411	707.169
		509.078		198.090		

Sumber data : KLHK,2022

Untuk mengatasi masalah lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi, reklamasi dan penghijauan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat

RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran.



Gambar 19. Rehabilitasi Hutan pada Lahan Kritis di Kabupaten OKI

Kegiatan rehabilitasi di Wilayah Sumatera Selatan tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemegang Persetujuan Pinjam Pakai kawasan Hutan sebagai pemenuhan kewajibannya, Badan Restorasi Gambut, KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 30. Rehabilitasi di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

No	Pelaksana	Sumber Dana	RINCIAN LUAS REHABILITASI PER TAHUN (Ha)										JUMLAH (HA)	RINCIAN LOKASI REHABILITASI			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		HP	HL	KK	APL
1	Pemegang Kewajiban IPPKH	Pihak ke-3	453	171	723	173	742	963	863	478	849	2.317	7.731	300	5.533	1.898	-
2	Kementerian LHK / Balai PDASHL Musi	APBN	410	395	200	1.145	700	10.400	-	3.100	1.500	320	18.170	-	18.170	-	-
3	Kementerian LHK / Balai PDASHL Ketahun	APBN	-	-	-	-	-	7.250	-	-	-	-	7.250	-	7.250	-	-
4	Badan Restorasi Gambut Mangrove	APBN	-	-	-	-	10	50	-	20	15	-	95	73	-	-	22
5	Dinas Kehutanan *)	APBD	60	100	80	31	-	2	-	4	25	29	302	211	-	-	91
6	PEN Rehabilitasi Mangrove (BRGM)	APBN	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250	-	250	-	-
7	Kerjasama Para Pihak (PLN, SKK Migas, PT. PUSRI)	CSR BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	19	-	-	-	19
TOTAL PER TAHUN			923	666	1.003	1.349	1.452	18.665	863	3.852	2.398	2.676	33.817	584	31.203	1.898	132

Sumber data : Bidang PDAS RHL, 2023

Dalam rangka menunjang kinerja luas lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi, Dinas Kehutanan pada tahun 2023 melaksanakan :

- a. Percepatan pelaksanaan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) telah diterbitkan SK. Gubernur Nomor 260/KPTS/DIHUT/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pananaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
- b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1) Pembagian Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah pada Wilayah UPTD KPH Wilayah II Lalan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin) berupa Musang King 1.785 batang
 - 2) Pembagian Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah pada wilayah UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura : Musang king 1.495 batang, Mangga 500 batang, Duku 250 batang, dan Durian 400 batang
 - 3) Pembagian Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah pada Wilayah UPTD KPH Wilayah V Lempuing – Mesuji berupa Musang King 1.785 batang.
 - 4) Pembagian Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah pada wilayah UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berupa Durian 400 batang, Alpukat 650 batang dan Petai 350 batang.
 - 5) Pembagian Bibit Pohon Kehutanan/MPTS /Tanaman Buah pada wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berupa Alpukat 1000 batang Kelengkeng 1300 batang, Nangka 450 batang, Petai 1300 batang, Nangka 1200 batang
- c. Melakukan Monitoring dan Operasional Pemantauan kegiatan Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten PALI
 - 1) Monitoring Penyediaan bibit Durian Musang King di Kabupaten Ogan Komering Ilir Proses Dokumentasi Pemeriksaan Bibit dan Kegiatan Survey Harga dalam rangka Penyediaan bibit Tanaman Di Dinas Kehutanan Prov Sumsel Lokasi : Ogan Ilir PD. Bertani
 - 2) Monitoring dan Verifikasi Lapangan penerbitan sertifikat standart Pengada dan Pengedar Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar serta Evaluasi urusan perbenihan/bibit tanaman hutan
 - 3) Monitoring Pengada Pengedar Tanaman Hutan Terdaftar Desa Jarai a.n Darawi
 - 4) Monitoring Pengada Pengedar Tanaman Hutan Terdaftar Kab, Banyuasin a.n Berkah Niagatamai

- 5) Kegiatan Survey Harga dalam rangka Penyediaan bibit Tanaman Di Dinas Kehutanan Prov Sumsel, Lokasi : Banyuasin CV. Berkah Niagatama
- 6) Monitoring Pengada Pengedar Tanaman Hutan Terdaftar dalam rangka Penerbitan Sertifikat Standar Kota Lubuk Linggau a.n Syahrudin
- 7) Monitoring Calon Lokasi Pelaksanaan Acara Hari Menanam Pohon tahun 2023



Gambar 20. Monitoring Pengada Pengedar Tanaman Hutan Terdaftar dalam rangka Penerbitan Sertifikat Standar

- d. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Penanaman Hutan Mangrove Science Techno Park Sungsang Kabupaten Banyuasin
- e. Pembinaan dan pemantauan DAS pada wilayah UPTD KPH Wilayah X Dempo, UPTD KPH Wilayah VI Saka dan UPTD KPH Wilayah V Lempuing.



Gambar 21 Pembinaan dan pemantauan DAS pada wilayah UPTD KPH

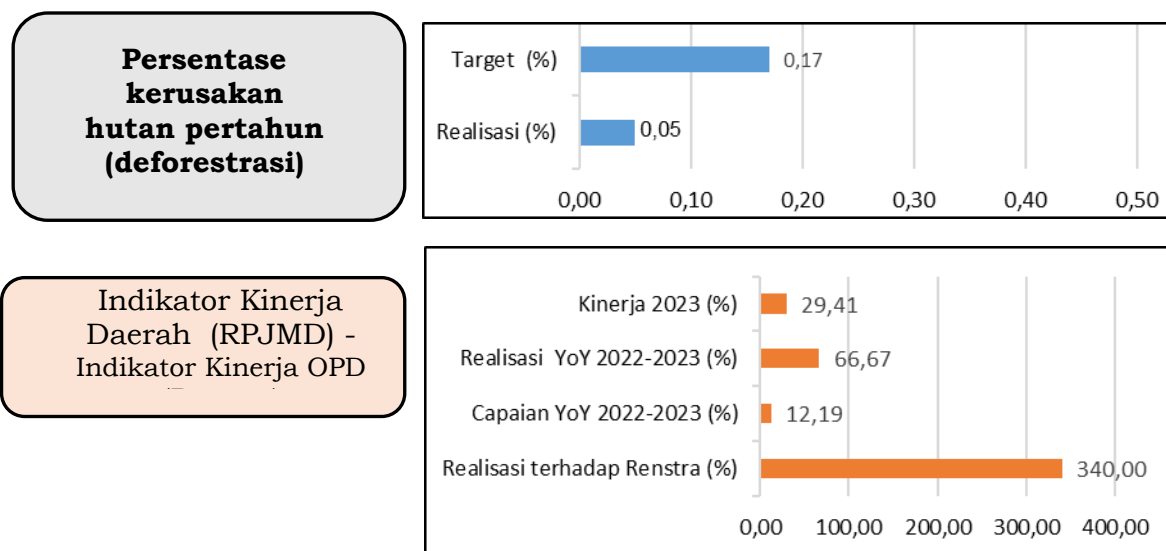
- f. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS dilakukan pada Kabupaten Palembang, Banyuasin, OKI, OKU, OKU Selatan dan Kota Pagar Alam.

Faktor penghambat indikator kinerja ini yaitu :

1. Para pelaku usaha penangkaran benih belum terintegrasi dalam Online single submission atau disingkat OSS, yaitu sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.
2. Anggaran untuk penyediaan bibit yang berkualitas sangat minim dibandingkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Belum didukung dana pemeliharaan lanjutan dan pengaman hutan untuk areal rehabilitasi DAS.

10. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)

Ikhisar



Deforestasi merupakan indikator kinerja Nasional dan sekaligus menjadi indikator utama kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020, indikator ini baru tahun 2021 ditetapkan menjadi indikator kinerja daerah sebagaimana dimuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Persentase kerusakan kawasan hutan pertahun (deforestasi) terealisasi sebesar 0,05%, yang diperoleh dari luas hutan yang rusak di Provinsi Sumatera Selatan yang diakibatkan oleh kebakaran dan luas penanganan kasus pengrusakan hutan. Capaian tahun 2023 atas indikator persentase kerusakan kawasan hutan pertahun (deforestasi) berdasarkan target dan realisasi adalah sebesar 29,41%. Realisasi dan capaian indikator ini dibandingkan dengan realisasi dan capaian

pada tahun 2022 sebesar 66,67% dan 12,19%. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 0,05 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra maka diperoleh capaian sebesar 340 %. Hal ini menunjukkan tercapainya target penurunan deforestasi Sumatera Selatan akibat kebakaran hutan dan pengrusakan hutan.

Data Dukung Capaian Kerusakan Hutan Pertahun (Deforestasi)

Deforestasi didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan (vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu) menjadi bukan hutan (bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi). Deforestasi umumnya disebabkan oleh : 1. Kebakaran Hutan 2. Pembukaan lahan perkebunan. 3. Perambahan hutan 4. Pembukaan lahan untuk pemukiman. 5. Pertambangan atau eksploitasi sumberdaya alam. Data-data yang deforestasi dapat ditaksir dari penutupan lahan pada tahun berjalan dibandingkan dengan luas kawasan hutan. Data-data yang diperlukan tersebut tidak tersedia, sehingga kerusakan hutan hanya didekati dengan data yang tersedia yaitu rusaknya hutan akibat kebakaran hutan.

Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan menggambarkan bahwa upaya mencegah dan melindungi kawasan hutan dari kerusakan-kerusakan baik yang disebabkan oleh manusia maupun faktor alam. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yaitu Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Untuk mencegah deforestasi telah dilakukan Kerjasama melakukan patroli bersama pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan pada areal kerja PBPH, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yaitu :

1. PT. Global Alam Lestari (PT. GAL)
2. PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP)

3. PT. Wahana Lestari Makmur Sukses (PT. WLMS)
4. PT. Sumber Hijau Permai
5. PT. Bara Anugrah Sejahtera (PT. BAS)
6. PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) Wilayah II Benakat
7. PT. Musi Mitra Jaya (PT. MMJ)
8. Gapoktan Mitra Bersama Sejahtera
9. Gapoktan Mitra Bersama Sejahtera
10. PT. Bukit Asam Tbk.
11. PT. Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai
12. SKK Migas-Medco E&P Grissik Ltd.
13. PT. Bara Anugrah Sejahtera (PT. BAS)
14. PT. Bara Anugrah Sejahtera (PT. BAS)
15. PT. Triaryani
16. SKK Migas PT. Pertamina EP Regional I Zona 4
17. SKK Migas-Medco E&P Grissik Ltd.
18. PT. Bhumi Sriwijaya Perdana Coal

Selain hal tersebut pada tingkat tapak dilakukan patroli dan sosialisasi pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan oleh 14 Unit KPH. Patroli pengendalian kebakaran hutan sekaligus berimbas pada pengamanan hutan bertujuan untuk menekan deforestasi.

SASARAN 4. Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan

Kinerja pada sasaran 4 dicapai melalui indikator kinerja Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)

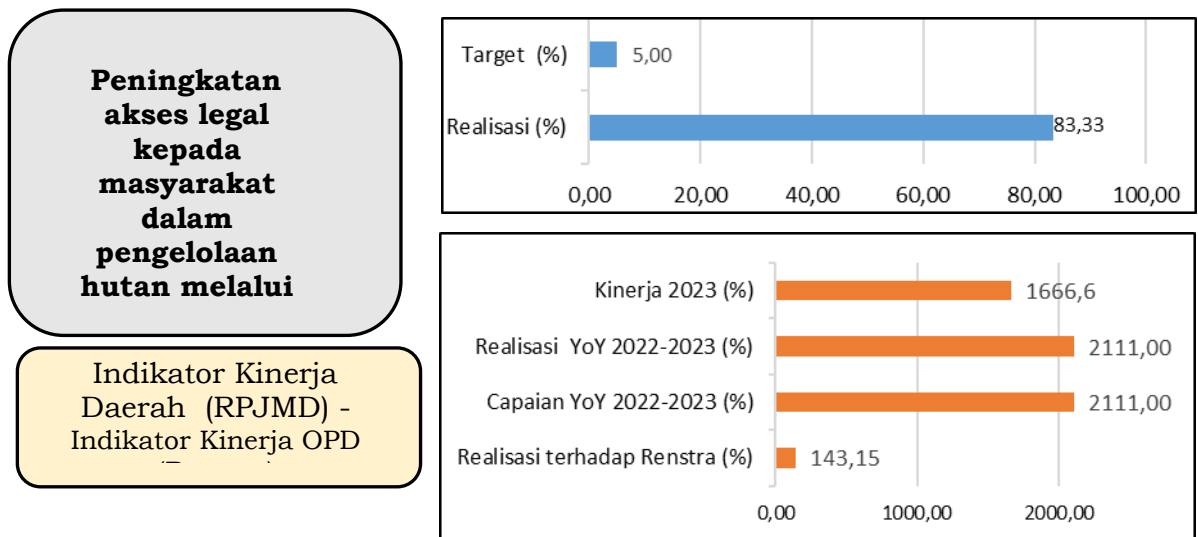
Tabel 31. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
IV	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat sekitar hutan	11. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	5,00	88,33	1.666

Total pagu untuk mendukung sasaran 4 sebesar Rp. 1.195.000.000,- dengan realisasi keuangan 89,06% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut

11. **Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)**

Ikhtisar



Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial merupakan indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Indikator ini dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Daerah sesuai Permendagri No 18 tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial terealisasi sebesar 16 kali lipat dari target yang ditentukan, Apabila dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 5 % maka diperoleh capaian sebesar 143.15%.

Pencapaian sasaran kinerja tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, dengan indikator kinerja (output) yaitu Tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi sebesar Rp.50.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.675.015,- dan realisasi fisik sebesar 100 %. Pelaksanaan penyusunan programa penyuluh kehutanan dilakukan secara zoom meeting, dengan mewajibkan seluruh penyuluh kehutanan di 14 UPTD KPH (43 orang) dengan narasumber berasal dari para pejabat pengawas dan administrator lingkup bidang teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Dasar dalam penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan mengacu pada Permen LHK Nomor: P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang penyusunan programa penyuluhan kehutanan. Adanya keterlibatan para penyuluh kehutanan pada tingkat tapak dan juga penyampaian dukungan antar bidang teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan terjadinya sinkronisasi dan komitmen antar pihak dalam mendukung program-program pembangunan kehutanan. Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian utama diantaranya aspek sumberdaya manusia, aspek teknis peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan, aspek kelembagaan dan aspek pengembangan usaha kelompok tani. Beberapa yang menjadi permasalahan pada teknis bidang telah dirumuskan ke dalam matrik programa kehutanan, yang nantinya akan menjadi uraian tugas para penyuluh kehutanan pada tingkat tapak.



Gambar 22 Pelaksanaan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dengan indikator kinerja (output) yaitu kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan sebesar Rp. 980.000.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 852.030.430,- atau 86,94% dan realisasi fisik sebesar 100 %. Penggunaan anggaran pada Bidang sebesar Rp. 420.000.000,- dan selebihnya digunakan untuk 14 UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai kegiatan pelaksanaan penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan. Kegiatan dalam rangka penguatan dan pendampingan juga diiringi dengan penyediaan Alat Ekonomi Produktif bagi kelompok tani hutan yang menysasar 6 KTH yaitu:

Tabel 32 Alat ekonomi produktif untuk KTH

Nama KTH	Nama Ketua	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Alat
UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka					
Karya Mandiri	Adi Ismanto	Galang Tinggi	Mekakau Ilir	OKUS	Pembubuk/Penggiling Kopi
Paluh Kijing	Najam Basri	Sukarami	Buay Sandang Aji	OKUS	
Nila	Suwarman	Margotani	Madang Suku II	OKUT	
UPTD KPH Wilayah VIII Semendo					
Tunggu Tubang I	Refliansyah	Tebing Abang	Semende Darat Tengah	Muara Enim	Pembubuk/Penggiling Kopi
Tebat Mampur	Sarmanudin	Muara Danau	Semende Darat Laut	Muara Enim	
Dusun II	Ripiansyah	Tanjung Raya	Semende Darat Tengah	Muara Enim	

Sumber data : Bidang PPM, 2023



Gambar 23. Penyerahan Alat Ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan

Selain memberikan fasilitasi alat ekonomi produktif di atas, kegiatan penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan yang menysasar pada kelompok hutan rakyat pada wilayah UPTD KPH lempuing mesuji berupa pelatihan terhadap para petani tanaman penghasil gaharu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan temu lapang sekaligus melakukan

praktik kegiatan rekayasa pembentukan tanaman penghasil gaharu di Desa Marga Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Gambar 24. Temu Lapang Rekayasa Tanaman Penghasil Gaharu

3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dengan indikator kinerja (output) yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perhutanan Sosial dan Hutan Hak pagu Rp. 165.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 164.581.009,- atau 99,75% dan realisasi fisik 100%.



Gambar 25. Seremonial Pembagian Akses Legal Perhutanan Sosial secara Virtual

Data Dukung Capaian Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diantaranya mengatur Perhutanan Sosial. Masyarakat dapat menyelenggarakan pemanfaatan hutan melalui dua skema yaitu Izin Berusaha yang ditujukan untuk dunia usaha dan Perhutanan Sosial untuk

masyarakat setempat atau disekitar hutan. Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: Hutan Desa; Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat; Hutan Adat; dan kemitraan kehutanan. Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Sedangkan Gubernur membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu anggota Tim Verifikasi Usulan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh masyarakat.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberadatkan lahan hutan.

Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.

Pada tahun 2023 jumlah total usulan KTH yang difasilitasi sebanyak 18 unit seluas 4.423,06 ha terdiri dari 17 unit yang mengajukan skema Hutan Kemasyarakatan dan 1 unit yang mengusulkan skema Kemitraan Kehutanan. Setelah melalui verifikasi teknis oleh KLHK dan perbaikan berkas hasil verifikasi tahun sebelumnya, pada tahun 2023 disetujui sebanyak 15 usulan dan ditetapkan

sebagai Kelompok Perhutanan Sosial. Sedangkan sisanya masih dalam proses persetujuan, mengingat areal yang dikelola masyarakat didominasi oleh tanaman sawit sehingga diperlukan verifikasi lanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. SK Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang terbit tahun 2023 sebagai berikut :

1. Hutan Kemasyarakatan (HKm): 7.435 Ha, jumlah kelompok tani hutan (KTH) 13 unit, jumlah anggota 1.446 KK.
2. Hutan desa (HD) : 1.657 Ha, jumlah unit 2 unit, jumlah anggota 86 KK.

Masyarakat yang berusaha di dalam kawasan hutan di Sumatera Selatan yang telah mendapat persetujuan Perhutanan Sosial dari Menteri sampai dengan tahun 2023 sebanyak 214 Kelompok, seluas 135.727 ha dan sebanyak 32.358 KK.

Tabel 33 Persetujuan Perhutanan Sosial yang ditetapkan Menteri LHK sampai dengan Tahun 2023

KABUPATEN	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
Musi Banyuasin	2	12.185	1.294	12	7591,29	1530	6	10.901	767	8	18.428,49	1.580	0	0	0	28	49.106	5.171
Banyuasin	1	553	19	31	8668,50	2320	0	0	0	4	1.616,96	907	0	0	0	36	10.838	3.246
Ogan Komering Ilir	1	505	26	3	4155	294	28	7.150,34	2.654	1	10.000	1.700	0	0	0	33	21.810	4.674
Ogan Komering Ulu	0	0	0	3	2330	491	31	1.185,73	128	0	0	0	0	0	0	34	3.516	619
Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	5	954	597	1	730	141	0	0	0	0	0	0	6	1.684	738
Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	31	16154,64	3738	3	2.217	337	0	0	0	0	0	0	34	18.372	4.075
Muara Enim	15	18.053	4.663	6	6299,70	759	0	0	0	0	0	0	1	43,70	334	22	24.396	5.756
Lahat	0	0	0	11	4182,40	1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4.182	1.429
Empat Lawang	0	0	0	2	967	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	967	104
Pagar Alam	0	0	0	9	2923	1116	0	0	0	0	0	0	1	336	234	10	3.259	1.350
Musi Rawas	7	2.897	4.504	1	290	90	0	0	0	1	110,48	36	0	0	0	9	3.297	4.630
MUSi Rawas Utara	1	1.104	67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1	1.104	67
TOTAL	27	35.297	10.573	103	47.780	11.206	69	22.184	4.027	13	30.086	5.974	2	380	578	214	135.727	32.358

Sumberdata: Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023

Pencapaian sasaran kinerja tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023. Selain itu pencapaian sasaran ini juga didukung oleh KLHK dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama melakukan fasilitasi Perhutanan Sosial. Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Tenaga Pendampingan Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 16 orang pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:

424/KPTS/DISHUT/2022 tanggal 10 Juni 2022. Tenaga PPTPK ditempatkan pada wilayah UPTD KPH sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 321/KPTS/VI/HUT/2022 tanggal 26 Juni 2022.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan dan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi. Penempatan tenaga penyuluh kehutanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 34 Sebaran Penyuluh Kehutanan Tahun 2023

No	UPTDKPH	Existing PK Dalam Jabatan							Jumlah
		Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Pelaksana Lanjutan	Pelaksana	Pemula	
1.	Dinas Kehutanan	1	-	1*	-	-	-	-	2
2.	Wil. I Meranti	-	1	1*	-	-	-	-	2
3.	Wil. II Lalan Mendis	-	1	1*	-	-	-	-	2
4.	Wil. III Palembang-Banyuasin	2	-	1*	-	1			4
5.	Wil. IV Sungai Lumpur-Ridding	-	1	1*	-	-	-	-	2
6.	Wil. V Lempuing Mesuji	-	-	3**	-	-	-	-	3
7.	Wil. VI Bukit Nanti-Martapura	2	5	-	1	-	-	-	8
8.	Wil. VII Mekakau Saka	1	-	1*	-	-	-	-	2
9.	Wil. VIII Semendo	-	1	1*	-	-	-	-	2
10.	Wil. IX Suban Jeriji	-	3	-	-	-	1	-	3
11.	Wil. X Dempo	-	-	1	-	-	-	-	1
12.	Wil. XI Kikim Pesemah	-	3	1	-	-	-	-	4
13.	Wil. XII Benakat	1	-	1*	-	-	-	-	2
14.	Wil. XIII Lakitan Bukit Cogong	2	4	-	-	-	-	-	6
15.	Wil. XIV Rawas	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		9	19	13	1	1	1	0	43

Sumberdata : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023.

3. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dilaksanakan oleh 14 UPTD KPH terdiri dari 100 objek pendampingan. Kegiatan pendampingan dan penguatan KTH mulai dari pendampingan pra persetujuan/ proses pengajuan usul perhutanan sosial, penguatan kelembagaan existing kelompok, penataan areal, penyusunan rencana kerja dan pengembangan usaha. Disamping itu juga, diberikannya fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha kelompok tani hutan melalui pemberian Alat Ekonomi Produktif.
4. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dengan yaitu :
 - a. Fasilitasi penanganan konflik terjadi antara Kelompok Masyarakat di Desa Simpang (ketua Junaidi) yang berkonflik dengan PBPH RE PT. Kerawang

Ekawana Nugraha di wilayah kerja UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding.



Gambar 26 Fasilitasi kemitraan kerjasama KPS dan penanganan konflik

- b. Kegiatan koordinasi bersama Pokja PPS Sumsel dengan pemerintah kabupaten
- c. Kegiatan identifikasi indikator kunci program REDD+ terkait pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial, khususnya di wilayah UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji
- d. Fasilitasi permohonan transformasi kemitraan kehutanan UPTD KPH Wilayah I Meranti, UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis dan UPTD KPH Wilayah Wilayah III Palembang Banyuasin dengan mitra Kelompok Tani Hutan / Gabungan Kelompok Tani Hutan.
- e. Fasilitasi kemitraan kerjasama kelompok perhutanan sosial penghasil komoditi karet cair (latek) antara PT. Hevea Eka Asia (selaku offtaker) dengan Gapoktanhut Sialang Makmur di wilayah UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji dan KTH Rengas Sejahtera di wilayah UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin.
- f. Fasilitasi usulan revisi SK persetujuan perhutanan sosial di wilayah UPTD KPH Wilayah X Dempo.
- g. Monitoring usulan permohonan persetujuan Hutan Desa yang tertunda di wilayah UPTD KPH Wilayah IV Riding Sungai Lumpur dan usulan permohonan persetujuan HKm tertunda pada UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura.
- h. Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan perhutanan sosial pada UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji, Wilayah VI Bukit Nanti Martapura, Wilayah VII Mekakau Saka, Wilayah IX Suabanjeriji dan Wilayah XI Kikim Pasemah.

- i. Monitoring, evaluasi dan fasilitasi proses permohonan kemitraan kehutanan antara KTH Tunas Jaya dengan PBPH PT. Musi Hutan Persada.
 - j. Pendampingan kunjungan Tim UNDP dalam rangka uji petik pemantauan pelaksanaan perhutanan sosial pada Kelompok Perhutanan Sosial Terusan Sialang Lempuing Mesuji.
 - k. Menghadiri pelaksanaan Pekan Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona) di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta.
 - l. Koordinasi pengembangan hutan hak di UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding, Wilayah IX Subanjeriji.
 - m. Monitoring HHBK dan Jasa Lingkungan di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis.
 - n. Identifikasi pengembangan hutan hak dan HHBK di UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti dan Martapura.
 - o. Pembinaan dan fasilitasi penetapan hutan hak, hutan rakyat, hutan adat beserta potensi pengembangan HHBK di UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah.
 - p. Fasilitasi pengembangan usaha di KUPS Kopi Ringkeh Mude Ayek Tebat Benawa Kota Pagar Alam.
 - q. Identifikasi dan inventarisasi potensi hutan rakyat di UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding, Wilayah V Lempuing Mesuji, Wilayah XI Kikim Pasemah.
 - r. Monitoring kegiatan pendamping, diskusi dengan Direktorat PKTL terkait kegiatan pendampingan termasuk penyampaian permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pada unit KPS.
4. Kegiatan pendampingan terhadap Kelompok Masyarakat yang dilakukan oleh UPTD KPH berupa Sosialisasi dan Pendampingan Usulan PS, Pengukuran/ Pemetaan Usulan Lokasi PS, Pendampingan dan Sosialisasi Pasca Terbitnya Persetujuan PS, Penyusunan RKPS dan RKT, Pembentukan dan Pembinaan KUPS, Monev PSDH,PNBP pada HHBK Areal PS, Monev PS sebagaimana tabel berikut :

Tabel 35 Pendampingan Kelompok Masyarakat/ Kelompok Tani Hutan Tahun 2023

No	Nama KPH		Pendampingan Kelompok Masyarakat/ Kelompok Tani Hutan (Kelompok)							
			Sosialisasi dan Pendampingan Usulan PS	Pengukuran /Pemetaan Usulan Lokasi PS	Pendampingan dan Sosialisasi Pasca Terbitnya Persetujuan PS	Penyusunan RKPS dan RKT	Pembentukan dan Pembinaan KUPS	Monev PSDH,PN BP pada HHBK Areal PS	Monev PS	Jumlah
1	UPTD KPH Wilayah I	Meranti	1			8	2		2	13
2	UPTD KPH Wilayah II	Lalan Mendis	1	5	2	4	1			13
3	UPTD KPH Wilayah III	Palembang-Banyuasin				3		7	3	13
4	UPTD KPH Wilayah IV	Sungai Lumpur	2			1		1		4
5	UPTD KPH Wilayah V	Lempuing-Mesuji				6		6	5	17
6	UPTD KPH Wilayah VI	Bukit Nanti Martapura	6			1			10	17
7	UPTD KPH Wilayah VII	Mekakau Saka	4			7			8	19
8	UPTD KPH Wilayah VIII	Semendo	1			8	5	3	9	26
9	UPTD KPH Wilayah IX	Suban Jeriji	7							7
10	UPTD KPH Wilayah X	Dempo	1						11	12
11	UPTD KPH Wilayah XI	Kikim Pasemah	12			2	1	1	2	18
12	UPTD KPH Wilayah XII	Benakat	6							6
13	UPTD KPH Wilayah XIII	Lakitan Bukit Cogong	8			3	14		2	27
14	UPTD KPH Wilayah XIV	Rawas	7							7
		Jumlah	56	5	2	43	23	18	52	199

Sumber data : Diolah dari Laporan Tahunan UPTD KPH Wil I – XIV

Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian kinerja ini yaitu :

- Belum adanya kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Perhutanan Sosial. Pemerintah daerah masih berpendapat bahwa kehutanan adalah wewenangny Pemerintah Provinsi.
- Kegiatan perhutanan sosial pasca dikeluarkannya izin persetujuan memerlukan pendampingan yang intens. Pendampingan ini menjadi kunci keberhasilan perhutanan sosial. Namun demikian, KPS yang telah ditetapkan oleh BPSKL sebagai prioritas dampingan memiliki aksesibilitas yang beragam. Tentunya lokasi perairan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan yang intens dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk menuju lokasi yang cukup mahal.
- Dengan jumlah kelompok binaan sebanyak 250 unit (214 merupakan kelompok perhutanan sosial dan 36 merupakan kelompok hutan rakyat), maka terlihat bahwa kegiatan pendampingan terhadap kelembagaan tani masih belum optimal. Artinya, ada beberapa kelompok yang belum mendapatkan fasilitasi tenaga pendamping. Oleh karena itu, melalui dana APBN telah difasilitasi melalui BPSKL wilayah Sumatera untuk mengalokasikan 47 tenaga pendamping, untuk mendampingi 47 unit kelompok perhutanan sosial yang terdiri dari unsur penyuluh

kehutanan, PKSM dan staf KPH. Sedangkan melalui dana APBD, dinas kehutanan melakukan rekrutmen sebanyak 16 orang untuk mendampingi 16 kelompok perhutanan sosial. Tentunya target kegiatan pendampingan terhadap kelompok perhutanan sosial diupayakan untuk meliputi keseluruhan kelembagaan tani yang ada. Dengan anggaran yang tersedia sampai dengan saat ini, baru terakomodir sebanyak 63 kelompok atau baru sebanyak 49,6% sedangkan 50,04 % (atau sebanyak 124 unit KPS) belum mendapatkan fasilitasi tenaga pendamping.

- d. Pemahaman tugas dan fungsi jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang belum dipahami oleh pejabat pengawas dan administrator pada lingkup UPTD KPH.
- e. Pemberdayaan tenaga penyuluh kehutanan oleh teknis bidang yang belum optimal, sehingga tenaga penyuluh kehutanan tingkat tapak minim informasi terkait kegiatan maupun program-program pembangunan kehutanan yang mendukung kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

SASARAN 5. Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik

Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah terealisasi sebesar 100%, yang diperoleh dari jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran pada tahun 2022. Kinerja pada sasaran 5 dicapai melalui indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)

Tabel 36. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.

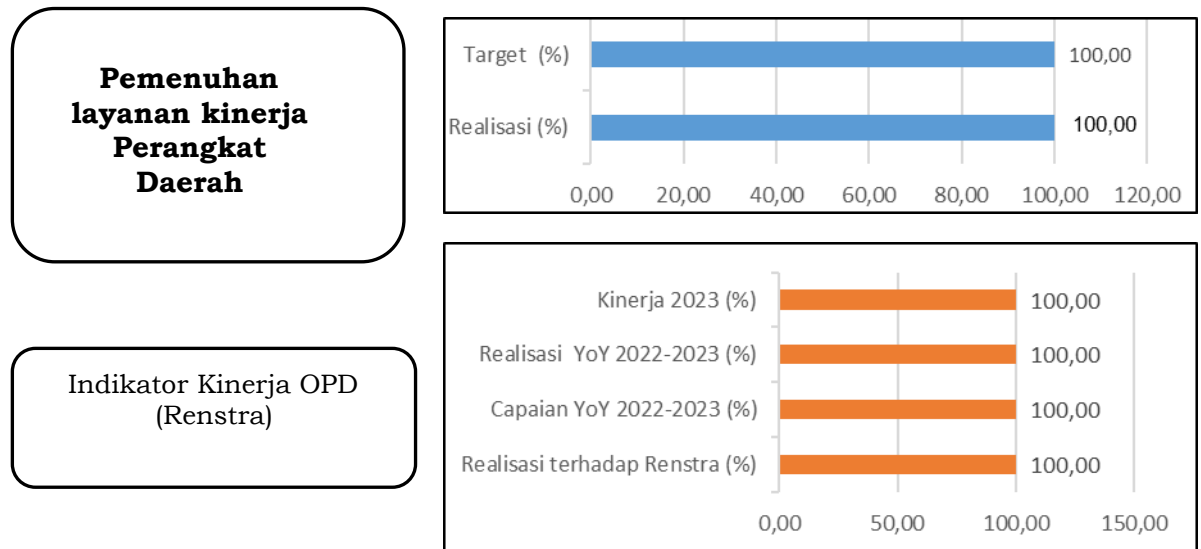
No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	12. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100

Total pagu untuk mendukung sasaran 5 sebesar Rp. 50.546.214.478,00,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.381.183.869,00 atau 95,72 % dan realisasi fisik

99,87%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

12. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)

Ikhtisar



Jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran yang terlaksana pada tahun 2023 sebanyak 23 kegiatan dari 23 kegiatan yang direncanakan dalam Renstra sehingga kinerja layanan telah terpenuhi 100 %. Dibandingkan tahun 2022 pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dan terhadap Renstra sebesar 100%.

Data Dukung Capaian Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan operasionalisasi perkantoran yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Program Penunjang Pemerintah Daerah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.150.000.000 terrealisasi sebesar Rp.148.159.547,00 atau 98,77 %. Output dari kegiatan ini berupa dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU serta pengumpulan data dokumen perencanaan. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 % target terpenuhi. Realisasi sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor, belanja alat/bahan

untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Perjalanan dinas biasa dilakukan untuk kordinasi ke UPTD KPH Wilayah I-XIV dan KLHK.

Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah pada Anggaran dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.840.453,00. Dokumen perencanaan yang terealisasi terdiri dari Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) 2023, Renja 2023 perubahan, dan Dokumen Perencanaan Anggaran yang terdiri RKA, DPA, RKA dan DPA Perubahan. Dokumen perencanaan dapat tersusun dengan baik.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.200.000.000 terrealisasi sebesar Rp198.969.911,00 atau 99,48 %. Koordinasi ini dilakukan ke UPTD KPH, KLHK, Menpan RB dan Mendagri. Output dari kegiatan ini berupa laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Target output sebanyak 20 laporan, terealisasi sebanyak 20 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi.

Kegiatan koordinasi dilakukan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Dana DBH DR, Koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi data pendukung, Matriks Penilaian KPH Efektif, Koordinasi dalam rangka pelaksanaan penilaian KPH Efektif, Koordinasi dalam rangka Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan, Koordinasi dalam rangka peninjauan lapangan untuk usulan perubahan standar biaya umum ke Kec. Air Sugihan dan Kec. Tulung Selapan, Wilayah UPTD KPH Wilayah IV, Koordinasi dalam rangka Identifikasi dan Verifikasi Calon Lokasi Rencana Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Koordinasi dalam rangka FOLU NET SINK dan Koordinasi dalam rangka Asistensi Penyusunan Road Map RB dan Evaluasi AKIP dengan Kementerian PAN RB. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 41.424.385.500,- terrealisasi sebesar Rp. 39.518.066.314. atau 95,40

%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Target output sebanyak 299 orang, terealisasi sebanyak 292 orang atau sebesar 96,98 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan Beras PNS, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Pembulatan Gaji PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS.

Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah pada bulan Desember tunjangan pendapatan pegawai tidak dibayarkan oleh Pemprov Sumsel sehingga terjadi kelebihan anggaran yang cukup besar. Selain itu juga terdapat pegawai ASN yang pensiun dan pindah tugas ke OPD yang lain

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 253.120.000,- terrealisasi sebesar Rp. 247.060.000 atau 97,61 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Realiasi sub kegiatan ini berupa belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa. Target output sebanyak 3 dokumen, terealisasi sebanyak 3 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 180.000.000,- terrealisasi sebesar Rp178.865.484,00 atau 99,37 %. Sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa.

Koordinasi dilakukan ke UPTD KPH Wilayah I- XIV, Bidang pada Lingkup Dinas Kehutanan, Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah dan Bank Sumsel Babel. Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Target output sebanyak 20 laporan, terealisasi sebanyak 20 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp. 100.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 99.746.064 atau 99,75 %. Sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Target output sebanyak 1 (satu) dokumen, terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi. Pengamanan barang milik daerah di Kota Palembang dan Wilayah UPTD KPH.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebesar Rp. 50.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 48.356.756 atau 96,71 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Target output sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, Penilaian kinerja pegawai dilakukan dalam lingkup Dinas Kehutanan dan UPTD KPH.

8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi sebesar Rp.198.000.000,- terrealisasi sebesar Rp.198.000.000,- atau 100 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Target output sebanyak 11 orang, terealisasi sebanyak 11 orang atau sebesar 100 %. Diklat ini dilaksanakan oleh CPNS Polisi Hutan Dinas Kehutanan di Sukabumi.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor sebesar Rp.90.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 89.952.933,- atau 99,5 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terrealisasi sebanyak 1 paket atau 100 persen target output dapat terlaksana.

Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi . Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah perlunya perombakan total terhadap komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan. Instalasi yang ada merupakan instalasi yang sudah tua sehingga perlu perbaikan terhadap komponen listrik yang sudah tua.

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 425.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 420.065.000 ,- atau 98,84 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Perlengkapan kantor diantaranya, Alat Pendingin, Kursi Rapat Pejabat, Kursi Tamu di Ruangan Pejabat, Peralatan Studio Audio, Personal Computer dan Komputer Unit Lainnya. Target output sebanyak 3 paket, terrealisasi sebanyak 3 paket atau 100 persen dari target output. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 86.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 85.224.900 ,- atau 99,10 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terrealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 185.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 182.575.598 ,- atau 98,69 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Bahan yang

dibelikan adalah alat tulis kantor. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 100.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 94.633.632 ,- atau 94,63 %. Realisasi dari subkegiatan ini adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 6.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 5.940.000,- atau 99,00 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

15. Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 160.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 159.315.000 ,- atau 99,57 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Realisasi sub Kegiatan ini berupa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebanyak 58 kali. Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serapan anggaran dan target output dapat terrealisasi dengan baik.

16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 1.544.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 1.539.450.404 ,- atau 99,71 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Target output sebanyak 400 laporan, terealisasi sebanyak 400 laporan atau sebesar 100 %. Sub kegiatan ini

terdiri atas belanja perjalanan dinas. Koordinasi dan konsultasi dilakukan ke KLHK, Kemendagri, KemenPAN RB dan Pemerintah Kabupaten di Sumsel. Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serapan anggaran dan target output dapat terrealisasi. Terdapat evaluasi untuk perjalanan dinas luar provinsi didapatkan bahwa pagu anggaran tiket pesawat pada permendagri untuk beberapa kota lebih rendah dibandingkan dengan biaya riilnya.

17. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Anggaran Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp. 70.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 69.264.000 ,- atau 98,95 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Target output sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

18. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 40.000.000 ,- atau 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan. Kegiatan ini berupa sewa gedung untuk UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti dan UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah. Target output sebanyak 2 unit, terealisasi sebanyak 2 unit atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi.

19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 22.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 16.357.505,- atau 74,35 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos dan belanja paket/pengiriman. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Evaluasi terhadap serapan anggaran sebesar 74,35 % dikarenakan saat ini banyak surat

menyurat yang sudah menggunakan online, sehingga serapan anggaran menjadi kecil. Tetapi target output dapat dipenuhi 100 %.

20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 613.155.978,- . Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Realisasi sub kegiatan ini berupa Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Evaluasi terhadap serapan yang sebesar 80,39 %. Dikarenakan sebagian kantor KPH menggunakan token listrik. Penghitungan token listrik dari KPH terlalu tinggi sehingga menyebabkan over estimate anggaran. Kedepannya penghitungan kantor KPH yang menggunakan token listrik akan dihitung lebih akurat.

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 3.731.753.000,- terrealisasi sebesar Rp. 3.704.753.000,- atau 99,28 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, serapan anggran tidak mencapai 100 % dikarenakan dilakukan efisiensi.

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 786.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 724.301.677,- atau 92,15 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Realisasi dari sub kegiatan ini adalah belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, belanja asuransi barang milik daerah, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang dan belanja pemeliharaan

alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua. target output sebanyak 25 unit, terealisasi sebanyak 25 unit atau sebesar 100 %.

Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah pada penghitungan pajak. Penghitungan perkiraan pajak kendaraan terlalu besar sehingga anggaran tidak terserap 100%. Untuk tahun 2024 akan dilakukan perkiraan penghitungan pembayaran pajak yang lebih akurat.

23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 131.800.000,- terrealisasi sebesar Rp. 119.188.865,- atau 90,43%. Realisasi dari sub kegiatan ini adalah belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target output sebanyak 90 unit, terealisasi sebanyak 90 unit atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, serapan anggran tidak mencapai 100 % dikarenakan dilakukan efisiensi

Capaian kinerja keuangan dalam pemenuhan layanan perangkat daerah sangat baik, namun demikian berdasarkan analisa sumberdaya yang mendukung kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan masih perlu peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya, yaitu: Tenaga Penyuluh, Tenaga Polisi Kehutanan, Gedung kantor UPTD KPH, Mebeler dan peralatan mesin kantor dan Sarana mobilitas/operasional lapangan.

F. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mengembangkan inovasi yang menunjang pencapaian sasaran kinerja antara lain:

Tabel 37 Daftar Inovasi Dinas Kehutanan Tahun 2023

NO	NAMA INOVASI PRAKTIK BAIK	PENJELASAN SINGKAT INOVASI PRAKTIK BAIK	LATAR BELAKANG	PENERIMA MANFAAT	DAMPAK	TAUTAN DATA PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (SONGKET)	SI PAKAR HUTAN merupakan suatu inovasi berbasis sistem informasi menggunakan platform website berbasis sistem informasi geografis (WebGIS) yang disediakan untuk kebutuhan, keperluan, dan kepentingan publik dalam memperoleh data titik panas (hotspot) dan informasi titik api (firespot) secara lebih dini (near real time) beserta opsi penanganannya.	Belum optimalnya penanganan dan lambannya informasi terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat, Akademisi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Penyediaan data dan informasi terkait pengendalian kebakaran hutan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam upaya pengambilan keputusan terkait perencanaan, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran hutan serta dapat mengurangi pemakaian kertas (paperless) karena	http://songket.sumselprov.go.id/
2.	Sistem informasi Perhutanan Sosial (SIHUTSOS)	sistem informasi yang dibangun untuk menampilkan perkembangan data perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan. Data dan informasi perhutanan sosial yang berubah dengan cepat perlu disajikan secara online sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Jumlah izin perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, Hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat yang berkembang dengan cukup signifikan. Masyarakat yang terlanjur mengelola lahan di kawasan hutan sangat antusias mengajukan usulan perhutanan sosial. Semua informasi mengenai perhutanan sosial dapat dengan mudah diakses oleh	Tingginya tekanan masyarakat terhadap kebutuhan lahan penghidupan terus mengancam kawasan hutan, perlu ada solusi terhadap keterlanjuran pengolahan kawasan hutan oleh masyarakat	Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Untuk memudahkan para pendamping lapangan mengupdate data perhutanan sosial secara real time dan mempercepat penyampaian Informasi publik secara luas tentang perkembangan perhutanan sosial di Sumatera Selatan.	https://dishut.sumselprov.go.id/
3.	Aplikasi persuratan	Pencatatan surat masuk Dinas Kehutanan sehingga terdokumentasi dan tercatat dengan baik	Sulitnya menelusuri arsip surat dan keluar masuk secara manual	Secara langsung bagi Pegawai dan umumnya	Memudahkan penelusuran surat masuk dan keluar serta pendokumentasian.	
4.	Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi kegiatan	Sistem pelaporan realisasi kegiatan baik fisik dan keuangan bagi pelaksana kegiatan setiap bulan secara online sehingga dapat diketahui dengan cepat perkembangan kegiatan beserta hambatan dan upaya penyelesaiannya.	Dinas kehutanan memiliki 14 UPTD yang berkedudukan di 14 Kota kabupaten, sehingga perlu pelaporan pelaksanaan kegiatan yang cepat dan responsif	PPTK dan pengambil kebijakan	Memudahkan sistem monitoring dan evaluasi	

Selain inovasi di atas, dalam rangka mendukung kinerja kehutanan telah dilakukan kerjasama-kerjasama diantaranya :

- a. Kerjasama dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial, perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan hutan untuk mendukung kinerja penurunan hotspot, penurunan luas kebakaran hutan, degradasi hutan dan konservasi hutan.
- b. Kerjasama dengan NGO mendukung kinerja perhutanan sosial, konservasi hutan dan nilai ekonomi karbon seperti ICRAF, WRI, YKAN.
- c. Kerjasama dengan BUMN mendukung kinerja rehabilitasi lahan

G. Penghargaan

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja organisasi dan memberikan motivasi agar tetap mempertahankan kinerjanya. Penghargaan juga dapat memberikan motivasi kepada organisasi agar lebih semangat dalam meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mendapat beberapa penghargaan sebagai berikut :

Tabel 38 Penghargaan Dinas Kehutanan Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima penghargaan	Keterangan
1.	Penilaian sangat baik Sekretariat Dinas Kehutanan selaku unit kearsipan	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	Sekretariat Dinas Kehutanan	Laporan audit kearsipan internal tahun 2023 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
2.	Hasil penilaian kinerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dengan nilai 90,49	Bappeda Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan	Penilaian kinerja dengan nilai 90,49 berarti memiliki penilaian baik. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian pengukuran kinerja, penyerapan anggaran, program terobosan.
3	Nilai akuntabilitas Kinerja tahun 2022 dengan nilai 75,77	Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan	Laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 75,77 dikategorikan "BB"

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 24 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggung jawab.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini berisikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun ke-5 dari rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RPJMD 2019-2023 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta 14 (empat belas) UPTD KPH menyelenggarakan pembangunan Kehutanan pada 5 (lima) sasaran, 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan dukungan dana dari APBD sebesar Rp.55.491.801.978 terealisasi sebesar Rp. 53.124.970.011,- atau 95,73 %.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan digambarkan sebagai berikut :

- 1) Capaian Indikator kinerja utama telah melampaui target Tahun 2023 sebanyak 9 (Sembilan) IKU sebagai pencapaian kinerja “Sangat Tinggi”. Indikator ini, juga berkinerja “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” terhadap target dan realisasi Tahun 2022. Terhadap target RPJMD atau Renstra juga dikategorikan “Tinggi”. IKU tersebut yaitu Produksi kayu sub sektor kehutanan, Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan, Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan, Jumlah Peta Tematik yang KSP, Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi, Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan, Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui

Perhutanan Sosial, Jumlah kasus yang tertangani dan Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Kinerja yang “Rendah” terdapat pada 3 (tiga) Indikator yakni penurunan luas kebakaran hutan, penurunan hotspot dan penurunan deforestasi. Pencapaian ketiga indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim (fenomena El Nino) dan kondisi lahan wilayah Sumatera Selatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah hotspot dan penurunan luas kebakaran yang signifikan dari tahun 2015 dan 2019 (kejadian fenomena elnino), hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan karhutla dan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik dan efektif.
- 3) Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial sangat efisien. Hal ini didukung oleh capaian kegiatan/sub kegiatan yang kinerjanya sangat efisien yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan dan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai media akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini, dirasakan belum pada taraf sempurna dan belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEHUTANAN

Alamat : Kol H. Burlan Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125

E-Mail : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANDJI TJAHJANTO, S.Hut., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HERMAN DERU

Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

PANDJI TJAHJANTO, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671102 199403 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jumlah pemegang izin yang taat membayar PNPB serta luasan konflik tenurial dapat diselesaikan	Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan	12.350 Ha
2.	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Produksi kayu sub sektor kehutanan	6.000.000 M ³
3.	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan	Rp.50.000.000.000
4.	Meningkatnya akses kelola kawasan hutan dan kegiatan ekonomi produktif	Jumlah peta tematik yang KSP	1 Tematik
5.	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0,17%
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,17%
		Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan	389 titik api
		Penurunan luas kebakaran hutan	5984,6 Ha
		Jumlah kasus yang tertangani	3 kasus
		Rasio kawasan lindung terhadap total luasan kawasan hutan	0,44 rasio
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	5%
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.241.978.978	APBD
2. Pengelolaan Hutan	2.361.600.000	APBD/DBH SDA Kehutanan-DR
3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	60.000.000	APBD
4. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	855.000.000	APBD
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	60.000.000	APBD

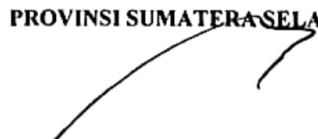
Palembang, 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



PANDJI TJAHJANTO, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671102 199403 1 003